

## **RISALAH RAPAT PANSUS II**

HARI/TANGGAL : RABU, 14 MEI 2025

JAM : 10.00 WITA - SELESAI

ACARA : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN JARINGAN  
UTILITAS TERPADU

### **DAFTAR HADIR ANGGOTA**

1. H. ALFIAN CHANIAGO, SE	: KETUA PANSUS II (H)
2. RATNA MAYASARI AGAN,SE	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
3. RUSTIA TOMPO	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
4. ULFA.A.MA.,Pust	: WAKIL KETUA PANSUS II
5. ABDURAHIM NASAR AL-AMRI,SE	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
6. ERMAN LAKUANA	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
7. RIENHARD VESTER TAMMA	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
8. MOHAMAD IMAM DARMAWAN	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)
9. ANDRIS,S.Sos	: WAKIL KETUA PANSUS II (H)

### **DAFTAR HADIR EKSEKUTIF**

1. MUH. ZAKKI	: BAGIAN HUKUM
2. NUR IRMA	: DPMPSTP
3. M. RIDWAN KARIM	: DINAS KOMINFO
4. M. NIZAM	: DINAS PERHUBUNGAN
5. MOH. AFFAN	: KABAG HUKUM
6. ISMAYADIN	: SEKDIS PU
7. HUSNA	: KABAG PERSIDANGAN
8. A.AGUSTIARTIE F.T	: KASUBAG PRODUK HUKUM
9. EMI. A	: DPRP
10. WAHYUDIN	: KABID TPHP

**RAPAT PANSUS II UTILITAS**  
**RABU, 14 MEI 2025**  
**11.00 WITA**

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH BAPAK IBU SEKALIAN ANGGOTA DPR REKAN REKAN KERJA SAYA DAN DARI DINAS INI ADA PAK KABAG HUKUM ADA PAK RIDWAN DARI KOMINFO YA DARI PTSP YA BAIK TERIMA KASIH SUDAH BISA HADIR DIRAPAT PANSUS UTILITAS INI DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM RAPAT PANSUS KALI INI KITA BUKA YA JADI KITA LANJUT INI PAK KABAG JADI MOHON MAAF JUGA INI PAK KABAG DAN TEMAN TEMAN SEKALIAN RAPAT INI AGAK SEDIKIT MOLOR MOLOR KARENA DENGAN KESIBUKANNYA TEMAN TEMAN YANG LAIN JUGA YANG KEGIATANNYA SALING BERTABRAKAN SEHINGGA RAPAT INI PANSUS INI BISA JADI MOLOR NAH DISINI KITA MENEKANKAN KEMBALI BAHWA PANSUS RANPERDA UTILITAS INI MEMANG INI KITA JUGA DISINI INI PAK KABAG MASIH YA SEDIKIT ADA KEGUNDAAN SEDIKIT APAKAH RANPERDA INI KITA LANJUT ATAU TIDAK TAPI SETELAH SAYA JUGA BANYAK MELIHAT DAN MENELAAH SEBENARNYA RANPERDA UNTUK UTILITAS INI MEMANG BANYAK MASUKAN DARI TEMAN TEMAN SEMUA MENGANGGAP INI BAIK HANYA SAJA MASUKKAN ITU UNTUK PROJECT INI MUNGKIN KITA BERSEPAKAT DULU DISINI BAHWA INI TIDAK MENGGUNAKAN DANA APBD BEGITU PAK JADI TEMAN TEMAN MENGANGGAP KALAU KITA MAU MENGGUNAKAN DANA APBD SEMENTARA BANYAK PROGRAM PROGRAM LAIN YANG BISA ATAU AKAN TERTUNDA ALHAMDULILLAH DISINI KEMARIN SEBENARNYA WAKTU KITA KE JAKARTA ITU KAN ADA PAK KABAG JUGA NAH HANYA SAJA INI KAN SUDAH KITA BAHAS ADA INVESTOR DAN SIAP HANYA SAJA KITA DISINI KOMITMENNYA MEREKA JUGA DISINI KOMITMEN MEREKA MUNGKIN DAN DISINI INI BARANGKALI ADA MASUKKAN DARI IBU RUSTIA MUNGKIN SAYA BERHARAP IBU RUSTIA LEBIH BANYAK BISA MENJELASKAN KEPADA TEMAN TEMAN KARENA KEMARIN INI KAN JUGA YANG HADIR INI HANYA SAYA PAK ERMAN HANYA SEBENTAR REINHARD JUGA HANYA SEBENTAR ULFA JUGA HANYA SEBENTAR JADI MUNGKIN JANGAN HANYA DARI SAYA MUNGKIN IBU RUSTIA JUGA BISA MENJELASKAN AKAN HAL INI SAYA PERSILAHKAN IBU RUSTIA

**RUSTIA TOMPO (ANGGOTA PANSUS)**

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU YANG SAYA HORMATI TEMAN TEMAN DEWAN YANG HADIR PADA PAGI HARI INI PERTEMUAN UNTUK PANSUS 2 YANG SAYA HORMATI PAK KABAG PAK AFFAN KADIS KOMINFO KEMUDIAN IBU IRMA DAN SELURUH STAFF YANG HADIR DIRUANGAN INI SEPERTI KEMARIN KITA SUDAH MELAKUKAN PERTEMUAN INI MENGENAI MASALAH PROGRAM PEMERINTAH DIMA KITA MENGGUNAKAN PENANAMAN KABEL DIUNDERGROUND ATAU DIBAWAH TANAH YA KEMARIN JUGA SUDAH BANYAK SAYA BERTEMU DENGAN BEBERAPA INVESTOR YANG AKAN MASUK KEKOTA PALU TENTUNYA DALAM HAL INI SATU GEBRAKAN BARU KARENA SEPERTI PAK ALFIAN KATAKAN TADI KITA INI TIDAK MUNGKIN MENGGUNAKAN ANGGARAN YANG ADA DIPEMERINTAH DAERAH LEPAS DARI ITU JUGA ANGGARAN KITA SUDAH DIPOTONG KIRI KANAN DAN JUGA TIDAK TER PLAN ANGGARAN ITU KITA MINTAKAN JANGAN SAMPAI DIAMBIL DARI ANGGARAN PEMERINTAH NAH KEMARIN SAYA SUDAH MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN BEBERAPA INVESTOR YANG ADA KEMUNGKINAN ITU SATU DARI DUBAI DAN DARI CHINA DAN MEREKA

INI NANTI DALAM WAKTU DEKAT AKAN MELAKUKAN KUNJUNGAN KEPALU SEBELUM KAMI MEMBAWA INVESTORNYA TENTU TIM TIM YANG DARI JAKARTA ITU LANGSUNG MELAKUKAN PERTEMUAN LANGSUNG DENGAN PAK WALI SUPAYA DALAM HAL INI KITA NANTI JANGAN ADA YANG ISTILAHNYA ITU TUMPAH TINDIH KARENA SAMA KITA KETAHUI SOON A LATER PASTI KITA AKAN MENUJU KESITU TIDAK BISA JUGA KITA TAHAN JANGAN SAMPAI TERJADI CROWDED SEPERTI DIJAKARTA ITU SUDAH BINGUNG KITA MAU DIAPAIN NAH KOTA KITA INI KECIL SEKECIL KECILNYA KOTA INI SEAUURNYA JUGA EQUIPMENT YANG ADA DIATAS ITU TENTU DALAM HAL INI SUDAH MERUPAKAN SATU APA NAMANYA MATA RANTAI DAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH JAUH SEBELUM KITA MELIHAT APA YANG TERJADI DI KOTA KOTA BESAR CONTOHNYA JAKARTA SURABAYA DAN MISALNYA MAKASSAR TAPI KALAU KITA MELIHAT YANG ADA DIKOTA BESAR ITU SUDAH MENJADI CONTOH DAN KITA SUDAH MELAKUKAN KUNJUNGAN KE BEBERAPA KOTA TIM TIM JUGA SUDAH MELIHAT LANGSUNG YANG MANA YANG SUDAH SELESA DIKERJAKAN PEMERINTAH SETEMPAT TENTU DALAM HAL INI PAK PAK WIM PAK IMAM TABE KITA MARI BERSAMA SAMA MEMBUKA DIRI KARENA JUJUR SAJA SAYA SENDIRI BEKERJA KERAS UNTUK MENDAPATKAN INVESTOR DAN DALAM HAL INI APA YANG DIDAPATKAN ITU SAYA TIDAK PUNYA KEPENTINGAN APAPA DISINI SAYA CUMA MAU BAGAIMANA KOTA KITA YANG KECIL INI BISA DISEJAJARKAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT JUGA NAH TENTU DALAM INI PUSAT PUN JUGA MUNGKIN MEREKA MENDAPATKAN FUNDING DARI LUAR ATAU ITU PROGRAM PEMERINTAH SAYA TIDAK TAHU YANG PASTI KITA AKAN MEMBUKA DIRI BAGAIMANA KITA BISA MENDAPATKAN FUNDING DARI LUAR AGAR TIDAK BERSENTUHAN DENGAN PROGRAM APA NAMANYA ANGGARAN ANGGARAN YANG DI BUAT PEMERINTAH SAAT INI KARENA OTOMATIS SEMUA INI TIDAK AKAN MAU MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH TENTU SAYAPUN SECARA PRIBADI BAIK SECARA PEMERINTAHAN TIDAK SETUJU KARENA UANG KITA BELUM SAMPAI KESITU PAK JADI TINGGAL BAGAIMANA NANTI KITA MENERIMA PARA INVESTOR INI TENTU KITA HARUS KEMBALI DENGAN PERJANJIAN PERJANJIAN YANG PASTI TIDAK MUNGKIN MEREKA LANGSUNG DUDUK MAU TENTU ADA PERWALINYA PEMERINTAH DAERAH MEMBUAT SATU APA NAMANYA PERATURAN YANG MANA APA YANG MENJADI HAK MEREKA APA YANG MENYENANGKAN BUAT MEREKA TENTU INI SAYA MINTA JANGAN CUMA ENAK DI KITA SUSAH DI INVESTOR ITU SENDIRI TAPI UNTUK SELANJUTNYA NANTI KITA AKAN BERBICARA LAGI KARENA SAYA AKAN MEMBUKA DULU APA APA YANG MENJADI KOMITMEN MEREKA KEMARIN PADA SAAT KITA DIJAKARTA YA TERIMA KASIH

**ERMAN LAKUANA, S.Sos (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH PAK KETUA SAYA MEMBERIKAN MASUKKAN BERKAITAN DENGAN APA NAMANYA APA YANG SUDAH SAYA BACAKAN. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU YANG TERHORMAT REKAN REKAN PANSUS DAN REKAN REKAN EKSEKUTIF YANG HADIR PADA PAGI HARI INI BERKAITAN DENGAN BAHASAN KITA YAKNI TENTANG UTILITAS SEPERTI APA YANG DIKETAHUI KETUA TADI BAHWA APAKAH KITA LANJUT ATAU BAGAIMANA SETELAH KITA BERSAMA SAMA MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA ATAU STUDI TIRU DIBEBERAPA TEMPAT MEMANG UNTUK KEMAJUAN KOTA INI MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN YA MAU TIDAK MAU JADI UNTUK MEMPERCANTIK KOTA DAN PENATAAN KOTA INI MAU TIDAK MAU HARUS KITA LAKSANAKAN KARENA BERKAITAN DENGAN EFISIENSI JUGA EFEKTIFITAS BERKAITAN DENGAN JARINGAN JARINGAN YANG SANGAT

DIBUTUHKAN OLEH KOTA ITU SENDIRI OLEH KARENA ITU SETELAH KITA BERSAMA SAMA MELAKUKAN KUNJUNGAN DENGAN MELIHAT SITUASI KOTA YANG ADA MISALNYA JAKARTA BANDUNG BOGOR TANGGERANG DAN BEKASI MEMANG ITU SUDAH SELAYAKNYA WALAUPUN SEBENARNYA SECARA KESELURUHAN ITU HARUS MEMPERTIMBANGKAN SPOT SPOT YANG DIUTAMAKAN TIDAK SEMATA DALAM KAWASAN KOTA ITU SENDIRI HANYA PADA YANG PERTAMA ITU KITA LAKUKAN PADA JALAN JALAN SPOT SPOT TERTENTU OLEH KARENA ITU MEMANG KALAU KITA MELIHAT JARINGAN YANG TERLAKSANA DI BEBERAPA KOTA ITU MEMANG SANGAT SANGAT BAGUS SANGAT SANGAT CANTIK SANGAT INDAH DAN TIDAK ADA JARINGAN JARINGAN ATAU KABEL KABEL YANG BERGELANTUNG DI SUDUT SUDUT KOTA OLEH KARENA ITU BERKAITAN DENGAN KARENA KEBETULAN MEMANG KALI INI SAYA TIDAK MELIHAT ITU INVESTOR ATAU APALAH ITU KITA APA NAMANYA BUKAN BERARTI KITA TAPI MEMANG KITA SANGAT MEMBUTUHKAN KARENA BERKAITAN DENGAN PEMBIAYAAN NAH APA YANG DIKATAKAN PAK ALFIAN TADI ITU KITA BISA GUNAKAN APA NAMANYA PENGANGGARAN BANYAK KERJA SAMA ITU YA HARUS KAYA PERSOALAN PERSIAPAN PENGANGGARAN DI KOTA INI YANG SANGAT MINIM TAPI KALAU MAU DIKATAKAN LAYAK TIDAK LAYAKNYA HARUS LAYAK HARUS KITA MULAI KARENA MEMANG KITA INI TERTUNDA BUKAN BERARTI DISAMPING ADA KEGIATAN TEMAN TEMAN LAIN TAPI MEMANG KITA FOKUS DI PEMBAHASAN UTILITAS INI YANG SUDAH KITA KITA PLANKAN BERSAMA BAIK BAPEMPERDA PIMPINAN DAN LAIN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN POKOK POKOK PEMBAHASAN DAN TAHAPAN TAHAPAN ITU SENDIRI YA KARENA ITU SUDAH BEBERAPA HAMPIR SATU BULAN YA KITA TERTUNDA TAPI BUKAN BERARTI TIDAK KITA HARUS MULAI INI TIDAK BISA TIDAK DENGAN MELIHAT APA NAMANYA MASUKKAN MASUKKAN DARI STEKHOLDER NAH DI BEBERAPA KOTA YANG LALU KAN ADA ASOSIASI DARI APA NAMANYA PENYELENGGARA ITU HARUS JUGA KITA LIBATKAN ITU MEREKA MEREKA PUNYA KOMPETENSI TERHADAP KARENA MEREKA YANG MEMPUNYAI ANGGOTA YANG INSYAALLAH AKAN MENJADI APA NAMANYA YANG AKAN MENGGUNAKAN DARI FUNGSI PELAYANAN ITU SENDIRI JADI SEMUA STEKHOLDER ITU NANTI KITA UNDANG DIAKADEMISI KARENA APA INI MAU TIDAK MAU DENGAN PERKEMBANGAN KOTA PALU YANG SUDAH SANGAT MAJU DAN PESAT INI ITU HARUS DIBUTUHKAN NAH PERSOALAN PENYELENGGARAANYA KITA DEWAN TIDAK BISA TERLALU JAUH MASUK KEDALAM RANAH ITU ITU MERUPAKAN RANAH EKSEKUTIF TAPI KITA HARUS TETAP MEMPERTIMBANGKAN PENGAWASAN PENGAWASAN BERKAITAN DENGAN APA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA ATAU DINAS YANG BERSANGKUTAN PERSOALAN TEKNISNYA ITU KITA SERAHKAN SAJA KEPADA DINAS YANG BERSANGKUTAN KITA TINGGAL MENGAWASI OLEH KARENA ITU DALAM POKOK PEMBAHASAN INI KITA LIHAT PENYELENGGARAANNYA GIMANA PELAKSANAANNYA GIMANA ITU TERTUANG DALAM PERDA UTILITAS INI JADI PIKIRAN SAYA INI PAK KETUA TIDAK BISA TIDAK HARUS TETAP KITA LANJUT PEMBAHASAN INI KARENA MELIHAT PERKEMBANGAN KOTA YANG SUDAH SEMAKIN MAJU SEHINGGA SANGAT MEMBUTUHKAN PENATAAN JARINGAN UNTUK WILAYAH KOTA PALU TERIMA KASIH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU

**M. RIDWAN KARIM (KADIS KOMINFO)**

TERIMA KASIH ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH SELAMAT PAGI SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI PIMPINAN PANSUS DAN ANGGOTA PANSUS SAYA LANGSUNG SAJA PAK MEMANG KALAU

KITA LIAT SEHARUSNYA DISINI ADA KADIS PU OH ADA TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KARENA MEREKA TIGA ORANG INI YANG MENJADI EKSEKUTOR DILAPANGAN HANYA SAJA TADI ADA MASUKKAN DARI PANSUS ANGGOTA PANSUS BAHWA MEMANG UNTUK MEMBANGUN JARINGAN UTILITAS INI MEMANG BUTUH BIAYA YANG SANGAT BESAR TIDAK SATU DUA MILYAR TAPI SAYA SUDAH PERNAH LIAT JUGA PAK WAKTU DIJAKARTA ITU KEMARIN ITU MEMANG DI KALAU UTILITAS YANG ADA DI DKI ITU KEBANYAKAN RATA RATA DIDAERAH-DAERAH MERDEKA KARENA KANTOR SAYA DISITU DULU DI KEMENDAGRI DISITU MEMANG PERNAH SATU KALI PADA SAAT BANJIR DULU DI DEPAN ISTANA ITU ITU KELIHATAN SEMUA MEMANG ITU SEMUA JARINGAN DAN MEMANG MEMBUTUHKAN BIAYA YANG SANGAT BANYAK KARENA MEMANG ANTISIPASINYA BARANGKALI BISA ADA FOKUS KITA MISALNYA DIDAERAH MANA DULU YANG KIRA KIRA BISA JADI SEBAGAI PERCONTOHAN BEGITU BISA DI LAPANGAN WALIKOTA ITU BOLEH JUGA JALUR DUA TAPI YANG DI DAERAH DAERAH LAIN MENUNGGU TAHAP TAHAP SELANJUTNYA BARANGKALI INI PAK SEMENTARA DARI KAMI TERIMA KASIH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU MUNGKIN ADA TAMBAHAN

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

BAIK TERIMA KASIH DIIZINKAN TERIMA KASIH YANG KAMI HORMATI KETUA PANSUS ANGGOTA PANSUS DAN SEMUA YANG HADIR DI SIANG HARI INI PERTAMA TAMA MARILAH KITA SELALU NERSYUKUR ATAS NIKMAT YANG DIBERIKAN SEHINGGA PANSUS YANG BEGITU LAMA INI SATU BULAN LEBIH MUNGKIN DALAM PEMBAHASAN UTILITAS INI KEMBALI DIBAHAS INSYAALLAH PERTEMUAN INI MEMPUNYAI BERKAH TERSENDIRI DALAM RANGKA PERCEPATAN REGULASI PERDA UTILITAS PENYELENGGARA UTILITAS TERPADU TENTUNYA PENYELENGGARA UTILITAS TERPADU INI SEDUAI DENGAN APA YANG KITA SUDAH LAKUKAN STUDI TIRU ATAU STUDI BANDING DIJAKARTA KEMARIN SAYA TIDAK IKUT DITANGSEL KITA SUDAH MENDAPAT BEBERAPA REFERENSI YANG SEBENARNYA SANGAT SANGAT KITA KETAHUI BAHWA UTILITAS ATAU JARINGAN UTILITAS PENTING DI DAERAH KOTA YANG SEMENTARA BERKEMBANG INI MAKANYA DALAM HAL INI MUNGKIN KITA HARUS MELIHAT SESUATU HAL INI DIDALAM REGULASI IN SEBENARNYA SUDAH MENCAKUP PENGANTAR SAJA DI PENJELASAN PASAL 1 ITU SUDAH MEMBEDAKAN APA NAMANYA UTILITAS JARINGAN UTILITAS DAN JARINGAN UTILITAS TERPADU SEBENARNYA KALAU DI PASAL 1 INI SUDAH DIBACA TENTUNYA KITA SEBENARNYA SUDAH SALING MEMAHAMI APA YANG DIMAKSUD DEFINISI DARI MASING MASING INI MAKANYA KITA INI SEBENARNYA HARUS MENJADIKAN SATU DULU SEHINGGA KITA BARU MASUK TERHADAP BATANG TUBUH DAN MATERI DAN ADA DIDALAM REGULASI JARINGAN UTILITAS TERPADU KENAPA SAYA SAMPAIKAN KEPADA ANGGOTA DAN SEMUA YANG HADIR INI SUPAYA KITA SAMA PERSEPSINYA KONDISI KITA INI SEBENARNYA KONDISI BUTUH PERCEPATAN DIMANA KITA KETAHUI MUNGKIN ADA REKAM KITA YANG DULU ADA JARINGAN YANG DIBANGUN OLEH SALAH SATU TELEKOMUNIKASI TETAPI JARINGAN ITU BISA BERADA DAN PASSANG KESANA KEMARI KITA TIDAK PUNYA REGULASI MAKA MELALUI KESEMPATAN INI KITA MEMBUAT REGULASINYA SUPAYA KITA BISA MENGATUR SEMUA APA YANG ADA DIPEMERINTAH KOTA PALU SEKALIGUS MENATA DIDALAM ATURAN INI JUGA ADA PEMBINAAN PENATAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU MAKA SAYA MENGANTAR DULU KEPADA BAPAK IBU APA NAMANYA JARINGAN UTILITAS TERPADU DIDEFINISI JARINGAN UTILITAS TERPADU MOHON MAAF SAYA

BACAKAN INI ADALAH HASIL KOORDINASI YANG BERKAITAN DENGAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS DAN PEMANFAATAN JARINGAN UTILITAS APA JARINGAN UTILITAS DIAYAT (2) MENGAKATAN JARINGAN UTILITAS ADALAH JARINGAN PENDUKUNG UTILITAS YANG TERLETAK DIATAS ATAU DIBAWAH PERMUKAAN TANAH ARTINYA KITA JANGAN BERDEBAT DALAM POSISIS ARGUMEN YANG SEBENARNYA SUDAH DIJELASKAN DALAM REGULASI INI MAKANYA KALAU UTILITAS ADALAH FASILITAS MENYANGKUT KEPENTINGAN YANG KITA BILANGSECARA UMUM MELIPUTI ADA LISTRIKNYA ADA TELEKOMUNIKASINYA ADA INFORMASI AIRNYA ADA GAS ADA BAHAN BAKAR ITU UTILITAS MAKANYA KITA INI MAU MENGATUR JARINGAN UTILITAS TERPADU KITA HARUS PUNYA PERENCANAAN YANG SAMA KONSEP YANG SAMA SEHINGGA KITA TAHU BAHWA OH INI DAERAH DAERAH NANTI DIBUAT DALAM MASTER PLAN MASTER PLAN ITU YANG AKAN MENETUKAN MANA TITIK YANG AKAN KITA BANGUN DIDAERAH KOTA PALU YANG KITA CINTAI BERSAMA INI SAYA YAKIN DAN PERCAYA SEBENARNYA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT INI MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENATA JARINGAN YANG SELAMA INI MEMANG SEMERAUP KITA INI KATAKAN JANGAN SEMERAUT KANAN KIRI BANYAK KABEL BANYAK VENDOR MAKANYA MUNGKIN KITA AKAN MELIHAT ITU NANTI DENGAN RAPAT PERENCANAAN MASTER PLAN MAKANYA MELALUI KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI PEMERINTAH KOTA PALU MELALUI KESEMPATAN INI SANGAT BERHARAP KIRANYA PENYELENGGARA UTILITAS INI MENJADI SATU REGULASI YANG BISA MENGATUR KEDEPANNYA DAN BISA NANTINYA KITA JUGA BISA MELIHAT KEINDAHAN KOTA SETELAH ADA REGULASI REGULASI DIBUAT INI BUKAN APA TETAPI DALAM RANGKA MENATA DAN MENGATUR APA APA YANG BELUM DIATUR DALAM SELAMA INI YANG DIBIARKAN SAJA INI PEMBIARAN KITA MAKANYA MELALUI KESEMPATAN INI KAMI MEMBUAT REGULASINYA UNTUK MENGATUR BAGAIMANA YANG TERBAIK UNTUK MASYARAKAT DAN UNTUK PEMERINTAH KOTA PALU KEDEPAN ITU PENGANTAR DARI KAMI MUDAH MUDAHAN HARAPAN YANG BESAR DARI PEMERINTAH KOTA PALU PENYELENGGARA JARINGAN UTILITAS INI BISA MENJADI REGULASI YANG MENGATUR KEDEPANNYA DAN UNTUK SEMUA YANG BERKECIPUNG ATAU BEKERJA DI SISTEM YANG ADA DI JARINGAN UTILITAS ITU MUNGKIN ITU SAJA KETUA PANSUS DARI KAMI DARI BAGIAN HUKUM INSYAALLAH DENGAN SEMUA APA YANG MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA DAN APA YANG MENJADI KEINGINAN PEMERINTAH DAN ANGGOTA DEWAN TERHORMAT INI BISA BERJALAN DI KOTA PALU MUNGKIN ITU DARI SAYA SAYA KEMBALIKAN KE KETUA PANSUS

**ISMAYADIN (SEKDIS PU)**

BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU DAN SELAMAT SIANG YANG SAYA HORMATI PIMPINAN RAPAT ANGGOTA DPRD PERWAKILAN DARI OPD BERKAITAN DENGAN AGENDA HARI SAYA APA YANG DISAMPAIKAN TADI DARI PAK KABAG MUNGKIN SUDAH TERSAMPAIKAN TETAPI SAYA LEBIH MENITIKBERATKAN KEPADA TUJUAN DIBENTUKNYA JARINGAN UTILITAS ARTINYA YANG KITA PIKIRKAN INI KEDEPAN SEKARANG INI POSISI KAMI DI DINAS PU ITU SELALU MEMVERIFIKASI TERKAIT DENGAN USULAN USULAN DARI VENDOR TELEKOMUNIKASI YANG MELALUI OSS KAMI TIDAK DALAM HAL INI KAMI TIDAK BISA APA MEMBERIKAN LARANGAN KETIKA PROSES PROSES YANG DARI PUSAT SAMPAI KE DAERAH ITU SUDAH TERPENUHI AKHIRNYA JADI AKAN SEMERAUT MEREKA SENANTIASA MELAKUKAN PEMASANGAN PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS ITU MENEMPEL PADA SATU

TIANG YANG SUDAH ADA DILAPANGAN TETAPI KALAU TIDAK KITA BUATKAN REGULASI INI KAMI DARI PEMERINTAH JUGA TIDAK BISA MELARANG KARENA SECARA PEMENUHAN TERKAIT DENGAN KAJIANNYA SUDAH TERPENUHI SEHINGGA ITU AKAN MENAMBAH BEBAN PEMERINTAH KOTA KEDEPAN SEHINGGA ITULAH TUJUANNYA KITA BENTUK APA NAMANYA PERDA INI TETAPI KALAU MUNGKIN ADA YANG KURANG MUNGKIN YANG KITA BICARAKAN BERSAMA TERKAIT KEKURANGAN DALAM HAL APA NAMANYA SAMPAI HAL INI MUNGKIN SATU BULAN LEBIH SUDAH BAHKAN KITA SDUAH MELAKUKAN STUDI TIRU TERKAIT ITU MUNGKIN KITA CARI BENANG MERAHNYA INI SEHINGGA INI TETAP DILANJUTKAN KARENA KEDEPANN BEBAN KAMI DIDINAS PU SANGAT BERAT SEKALI KAMI DALAM HAL INI MELAKUKAN VERIFIKASI DAN MENGEKSEKUSI SEHINGGA ITU MENJADI APA NAMANYA BEBAN KAMI KEDEPAN ITU MUNGKIN SEDIKIT MASUKKAN YANG SUDAH DIJELASKAN DARI PAK KABAG HUKUM PANJANG LEBAR MUNGKIN ITU TAMBAHAN KETUA TERIMA KASIH WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK TERIMA KASIH PAK KADIS PU PAK YADIN

**ABDURRAHIM NASAR AL'AMRI, SE (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH PIMPINAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU YANG SAYA HORMATI PIMPINAN PANSUS YANG SAYA HORMATI REKAN REKAN PANSUS YANG SAYA HORMATI OPD OPD YANG SUDAH HADIR DISINI SEMUA MUNGKIN SAYA LANGSUNG SAJA PAK JADI KITA KARENA SEBULAN KITA TIDAK BERTEMU MUNGKIN SAYA KITA CROSSCHECK KEBELAKANG DULU SEDIKIT PAK KARENA BAPAK BAPAK IBU IBU YANG ADA DISINI KAN KITA PERNAH KETEMU DISATU TITIK YAITU DKI JAKARTA TAPI DI TITIK KEDUA MUNGKIN ADA SEBAGIAN YANG PERGI ADA YANG TIDAK DITANGGERANG SELATAN WAKTU ITU JADI SEBENARNYA BEGINI PAK PERTAMA TAMA KITA HARUS SEPENDAPAT DULU BAHWA DPRD KOTA PALU SANGAT MENDUKUNG PERDA INI SANGAT MENDUKUNG PROGRAM UTILITAS INI TAPI KITA KEMBALI DULU KE BELAKANG KITA COBA LIAT DARI DKI PAK DKI ITU MELAKUKAN UTILITAS YANG TERJADI DI TENGAH TENGAH KOTA JAKARTA YANG BETUL BETUL LUAR BIASA TIDAK MEMBIAYAI OLEH APBD IBUKAN TAU BAPAK BAPAK DAN KABAG HUKUM TAU BEGITU JUGA KAMI KE TANGGERANG SELATAN PAK TANGGERANG SELATAN JUGA TIDAK MEMAKAI APBD JADI SEMUANYA HAMPIR MENURUT SAYA TIDAK MEMAKAI APBD TAPI SAYA SEBENARNYA SANGAT BAHAGIA SANGAT BANGGA KALAU TIBA TIBA TADI IBU RUSTIA TOMPO SUDAH Mencari BANTUAN KITA UNTUK INVESTOR TAPI YANG SEKARANG SAYA MAU NGEJARNYA SAYA BUKAN KE UTILITAS DULU PAK SAYA KEMBALI KE REGULASINYA KENAPA SAYA BICARA REGULASINYA KITA HARUS URUS DULU INI REGULASINYA HAMPIR SEMUA JARINGAN YANG TERPASANG SEKARANG SELAIN PLN MEREKA MENTANG MENTANG SUDAH ADA OSS NYA MEREKA SEENAK MEREKA JADI INI DULU YANG MUNGKIN KITA PIKIRKAN KARENA SAYA DENGAR KEMARIN KABAR BAHWA APAKAH BETUL APAKAH TIDAK PAK WALI ITU SUDAH MAU MERUBAH INI MALAHAN TIDAK BERPIKIR LAGI DIBAWAH TAPI MEMIKIRKAN YANG SATU TIANG YANG SISTIM YANG KEMARIN ITU YANG SATU TIANG TAPI MENYATU SEMUA ITU YANG SAYA DENGAR KEMARIN INI TERAKHIRNYA TAPI SAYA TIDAK TAHU NANTI MUNGKIN DARI EKSEKUTIF YANG AKAN LEBIH TAU TAPI SAYA CUMA MENGEJARNYA DISINI PAK KITA BERBICARA REGULASI YANG LAIN DULU IBU KAN DARI PERIZINAN TAU SENDIRI BAGAIMANA

KAMI TIAP WAKTU ITU KOMISI C RIBUT PAK DENGAN XL MEREKA SEENAK MEREKA KEKUATAN MEREKA ITU LEBIH PENUH DARIPADA KITA PUNYA DAERAH TIADA ARTINYA KITA INI DI DPR BAKU BANTAH DENGAN MEREKA KARENA MEREKA MERASA PUNYA OSS DARI PUSAT LANGSUNG JADI INI YANG MUNGKIN KITA KEJAR DULU REGULASINYA YANG TADI DISAMPAIKAN KEKABAG HUKUM KALAU SAYA SEBENARNYA MASALAH UTILITAS INI YANG MANA BAGUS UNTUK KOTA PALU PASTI KITA UTAMAKAN TIDAK MUNGKIN KITA AKAN MENGHALANGI ITU BARANG TAPI ADA TAPINYA YANG SAYA BILANG PAK CONTOHKAN INTA MAAF PAK YADI MUNGKIN DISINI ADA PERHUBUNGAN SAYA CONTOHNKAN KITA WAKTU PEMBAHASAN BIS ITU BIS DULU PERJANJIAN KITA MENYIAPKAN HALTE MENYIAPKAN SARANANYA TAPI NYATANYA HARI INI KITA SUDAH MEMAKAI APBD YANG BESAR KITA TIDAK TAU BAGAIMANA HASIL DARI BIS INI BAYANGKAN SATU TAHUN KITA MENCAPAI ITU 21 MILYAR SATU BULAN KITA HARUS MEMBAYAR 1,6 MILYAR UNTUK BIS YANG TIDAK ADA KITA TIDAK BILANG MANFAATNYA CUMA HARI INI KITA TIDAK MELIHAT ORANG DIDALAMNYA TAPI HARI INI KITA TIDAK BISA JUGA KETINGGALAN ZAMAN SAMA DENGAN YANG DISAMPAIKAN TADI YANG DISAMPAIKAN PAK ERMAN MASALAH UTILITAS INI KITA JUGA HARUS MENGIKUT ZAMAN KALAU MEMANG LAYAK UNTUK KITA PASANG AYO KITA PASANG KITA PELAJARI BETUL BETUL TAPI JANGAN NANTI KITA OKEKAN INI BARANG KALAU KAMI PRIBADI SAYA SELAKU FRAKSI DEMOKRAT MEMIHAK KALAU JANGAN MEMAKAI APBD KARENA INI SANGAT BESAR ANGGARANNYA KITA SANGAT SUSAH APBD KITA SEKARANG SAJA NGOS NGOS AN MASIH BANYAK UTANG KITA YANG BELUM KITA BAYARKAN DIKOTA PALU INI JADI KALAU SAYA SEBENARNYA PAK KABAG HUKUM PAK YADIN DAN DARI PERHUBUNGAN DAN IBU AMATIKA DAN IBU PERIZINAN KITA FOKUS KE REGULASINYA DULU INI INI XL INI INDIHOME INI DULU YANG KITA KEJAR SUPAYA KITA MENERIMA PAD DARI MEREKA KALAU SAYA INI SAJA DULU YA TAPI KEDEPAN DENGAN ADANYA IBU RUSTIA TOMPO Mencari posisi investor kita harus mendukung kemarin Alhamdulillah Ibu sudah membawa investor kepada kita kita liat asal liat tapi betul yang dibilang Ibu Rustia tidak semata mata dia datang langsung UCUK UCUK LANGSUNG MAU DIA HARUS BELAJAR DULU DIA HARUS LIAT DULU BAGAIMANA KERJA SAMANYA DENGAN PEMERINTAH KOTA JADI SEMATA MATA INI KAMI DPRD SANGAT MENDUKUNG DENGAN ADANYA PERDA UTILITAS TAPI ADA TAPINYA YAITU KITA MEMBAHAS DULU REGULASINYA YANG ADA KARENA IBU TAU SENDIRI KAN KEMARIN DIJAKARTA BAHWA SISTIM MEREKA ITU MASALAH MEMASANGNYA SEENAK MEREKA PAK YANG PUSING KITA DITELPON MASYARAKAT PAK ENAKNYA MEREKA PASANG DITIANG RUMAH MASYARAKAT ITU TAUNYA INI PEMERINTAH MASYARAKAT TAUNYA DIPASANG TIANG ITU PADA XL TARIK TIAP BULAN DENGAN MASYARAKAT TAPI TIDAK ADA MASUK DENGAN DAERAH PAK INI DULU YANG KITA PIKIRKAN TAPI SAYA TIDAK TAU BETUL ATAU TIDAK YANG SAYA DENGAR DILUAR BAHWA PAK WALI AKAN MEMIKIRKAN YANG TIANG SATU TIANG ITU NAH SUPAYA SEMUA XL INDIHOME NAIK DARI TIANG NYA PEMERINTAH TIDAK ADA LAGI MEREKA PUNYA TIANG KARENA SETIAP MEREKA MEMASANG TIANG YANG NAMANYA MEREKA PUNYA OSS MEREKA PUNYA HAK DAN KITA TIDAK IBARATNYA TIDAK DAPAT TAPI HARUSNYA KITA, KITA PUNYA DAERAH INI TAPI KITA TIDAK BISA ADA HAK UNTUK MENEGUR MEREKA KARENA MEREKA MEMPUNYAI IZIN DARI PUSAT YAITU OSS TADI YANG DISAMPAIKAN PAK YADIN JADI MUNGKIN ITU MUNGKIN SAJA YANG DARI SAYA PAK KETUA KITA FOKUS BETUL BETUL DENGAN UTILITAS INI JANGAN SAMPAI TIBA TIBA KITA MENGOKEKAN KITA MEMAKAI APBD LAGI KITA HARUS MEMIKIRKAN KARENA

TIDAK KECIL UNTUK MEMBIAYAI INI KITA HARUS MEMIKIRKAN BETUL BETUL KITA SHARING MUDAH MUDAHAN ADA PIHAK KETIGA KARENA KALAU DI DKI ITU DULU ADA JAK PRO KALAU DI TANGGERANG SELATAN ITU PAK ADA NAMANYA ITU ORGANISASI PERLISTRIKAN TAPI BUKAN ATLI KAN WAKTU ITU BANYAK ATLI JADI BUKAN ASOSIASINYA ADA ASOSIASINYA YA ITU YANG DIPAKAI OLEH TANGGERANG SELATAN NAH APAKAH DIKOTA PALU INI NANTI APAKAH MAU BAGAIMANA SISTEMNYA INSYAALLAH KALAU BETUL ADA INVESTOR YANG DATANG AKAN SERIUS KITA JALANI KITA BETUL BETUL BICARAKAN BERSAMA SUPAYA KITA 28.50 TAPI JANGAN PERNAH KITA MENGGUNAKAN APBD KARENA APBD KITA HARI INI SAJA BETUL BETUL NGOS NGOS AN KITA UNTUK MENGEJAR PAD KITA MUNGKIN ITU SAJA PIMPINAN DARI SAYA TERIMA KASIH BANYAK WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK TERIMA KASIH. IBU RUSTIA?

**ERMAN LAKUANA, S.Sos (ANGGOTA PANSUS)**

SEBENARNYA KALI INI MEMANG KITA SUDAH PROSES DALAM TAHAPAN PEMBAHASAN DIBATANG TUBUH ITU SENDIRI HARUS TIDAK BOLEH TIDAK NAH KALAI INI KAN KITA HARUS ADA PERTIMBANGAN SEPERTI YANG SAYA KATAKAN DIAWAL TADI HARUS ADA STECKHOLDER PEMERINTAH KAN PASTI PUNYA REKAN REKAN JARINGAN YANG ADA DALAM STECKHOLDER ITU SENDIRI DENGAN AKADEMISI OLEH KARENA ITU SUPAYA KITA CEPAT TINGGAL KITA JADWALKAN KAPAN KITA TANCAP INI BARANG TERUS TAPI KITA MENDENGARKAN DULU MASUKKAN MASUKKAN DARI STECKHOLDER ITU SENDIRI PAK KETUA SUPAYA SEHINGGA KITA MULAI PEMBAHASAN YANG DIMAKSUD DALAM BATANG TUBUH ITU SENDIRI PAK KETUA TERIMA KASIH

**RUSTIA TOMPO (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

YA SILAHKAN

**RUSTIA TOMPO (ANGGOTA PANSUS)**

SEBENARNYA SAYA SETUJU SEKALI DENGAN PAK WIM TADI DAN INI SEMPAT JUGA KITA BAHAS DIJAKARTA PEMAKAIAN TIANG TERPADU NAH KALAU MENURUT SAYA BAPAK DARI KOMINFO KITA SEBELUMNYA ITU SEBELUM SEMUA INI KE JALAN KEDEPAN SEMUA PROVIDER PROVIDER YANG ADA ITU KITA UNDANG YA SUPAYA NANTI JANGAN TERJADI SEPERTI YANG DISAMPAIKAN OLEH PAK WIM TADI PERTAMA SEMUA KABEL YANG MELINTAH DIUDARA KOMIU TIDAK DAPAT APA APA SEMUA PROVIDER YANG MASUK DISANA MENGATAKAN SUDAH PUNYA IZIN NASIONAL JADI KITA JUGA TIDAK DAPAT APAPA NAH INI YANG BENAR BENAR KOMIU HARUS KAJI SEBELUM APA NAMANYA INVESTOR ITU MASUK BATANG TUBUH ITU HARUS JELAS KARENA APA ORANG MENANAM UANG YANG ADA DISINI MENGINVEST BELUM TENTU DIA DAPATKA ITU DALAM SATU DUA TAHUN KARENA INI PLAN KITA LONG TERM AKAN PANJANG NAH INI YANG SAYA MINTA KOMIU SEBAGAI KOMINFO BENAR BENAR KARENA SEBENARNYA YANG UANG YANG LEBIH BANYAK KITA DAPAT INI DARI PROVIDER INI CUMA KITA TIDAK PUNYA KEMAMPUAN UNTUK MENDAPAT HAK HAK MENDAPATKAN HAKNYA KITA

ITU NAH KAMI SEMPAT KEMARIN DIJAKARTA MEMBAHAS INI JADI SAYA SAMPAIKAN BAHWA SAAT INI ORANG SAYA JUGA MELAKUKAN PERTEMUAN SELURUH PROVIDER YANG ADA DI INDONESIA INI TERMASUK XL TELKOM INDIHOME YA SEBELUM KITA MASUK KESINI TENTU JUGA KAMI AKAN MEMBERIKAN SUPPORT UNTUK KOMINFO BAGAIMANA PIHAK PIHAK YANG BERKAITAN INI JANGAN LAGI KOMIU MENERIMA IZIN IZIN IZIN IZIN SEMENTARA KITA INPROCESS MELAKSANAKAN APA YANG MENJADI PROGRAM PEMERINTAH DI AKAN DATANG INI KALAU KOMIU TERUS TERUS MENERIMA LAGI MENGATAKAN KAMI SUDAH PUNYA IZIN PASANG LAGI PASANG LAGI SAMA JUGA KOMIU MEMBUAT KAMI JADI BERAT KARENA JUJUR MEREKA ITU PUNYA PROVIT KITA DIKOTA TIDAK DAPAT APA APA SIAPA YANG BERHAK MENAHAN INI TENTU KOMIU BUKAN KAMI INI KAMI KE KOMIU KARENA APA YANG MENJADI KEINGINAN KAMI UNTUK MENAIK KE APDNYA KITA SENDIRI TIDAK TERCAPAI KARENA KOMIU MEMBERIKAN TERUS PELUANG BUAT MEREKA OLEHNYA DARI KABAG HUKUM JUGA TOLONG SEGERA BATANG TUBUH DARI APA YANG MENJADI UNDANG UNDANG ITU DIPERSIAPKAN SEBAIK MUNGKIN SUPAYA TIDAK ADA NANTI ISTILAHNYA MERUGIKAN KEDUA BELAH PIHAK PAK YA KARENA INGAT DIMANA ORANG MENANCAPKAN KAKI DISINI INVESTOR ITU TENTU MEREKA JUGA BERHARAP PROVIT AKAN DATANG TETAPI KALAU KOMIU TIDAK TAAT JUGA SEPERTI PROVIDER DARI INTERNET INTERNET PASANG PASANG TERUS INI BERARTI KITA PUNYA ERA INI SEMAKIN SEMRAUT ARTINYA ENAK DI DIA SUSAH DI PEMERINTAH KOTA SAYA RASA ITU PAK TERIMA KASIH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

TERIMA KASIH IBU RUSTIA PAK ERMAN DAN PAK WIM MUNGKIN ADA MASUKKAN DARI PAK IMAM SEBELUM SAYA LANJUT YA

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

YA TERIMA KASIH PIMPINAN YANG SAYA HORMATI PIMPINAN PANSUS SERTA REKAN REKAN ANGGOTA YANG SAYA HORMATI PAK KADIS PU KABAG HUKUM IBU IRMA TERUS ADA PAK KADIS KOMINFO TERUS ADA KABID SARANA DAN PRASARANA PAK MIZAN YA JADI KALAU SAYA KETUA KITA LANGSUNG SAJA MASUK DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KARENA KALAU KITA CUMA ADU ARGUMENTASI INI TIDAK AKAN SELESAI KALAU KITA SUDAH MASUK DI RANPERDA KITA LIAT SAJA DIDALAM ISINYA APA YANG MAU DITAMBAHKAN ATAU DIKURANGKAN JADI TINGGAL DILOIHAT PADA SAAT DDIBACAKAN NAH SARAN JUGA KETUA KALAU BISA PADA SAAT PEMBACAAN JANGAN DISETUJUI PASAL PER PASAL KARENA KALAU DISETUJUI PASAL PERPASAL INI KAN PASAL PERPASAL INI BERKAITAN NANTI KALAU KITA SUDAH SETUJUI PASAL PERPASAL PADA SAAT KITA MAU BALIK ITU SUDAH SUSAH KARENA KITA SUDAH SETUJUI BERSAMA NAH MUNGKIN ITU DARI SAYA PIMPINAN TERIMA KASIH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

YA BAIK JADI KALAU SARAN SAYA JUGA INI YA KITA LANJUT KE PEMBAHASAN KE BATANG TUBUH MUNGKIN KITA AKAN BAHAS PASAL PERPASAL KITA LANJUT KITA TELAHAH BETUL BETUL INI PAK KALAU SAYA MELIHAT DARI BEBERAPA KONSUMEN DAN PERTEMUAN JUGA INI KITA HARUS BETUL BETUL BAGAIMANA BISA KITA MEMUATKAN DIRI KITA ATAU ATURAN KITA SEHINGGA KETIKA TERJADI CRASH DILAPANGAN TIDAK ADA YANG SEPERTI PAK WIM BILANG TADI MEREKA PUNYA REGULASI TERSENDIRI YANG LEBIH KUAT DARIPADA ATURAN KITA NAH

INI JUGA SAYA JUJUR SAYA TIDAK MAU INI DAERAH KITA INI PUSAT PUNYA DAERAH BEGITU INI YANG HARUS KITA HARUS PIKIRKAN ATURANNYA JANGAN NANTI KETIKA KITA MELAKUKAN SUATU PROTES DAN LAIN LAIN KITA INI PEMDA TIDAK PUNYA KEWENANGAN ITU KEWENANGAN PUSAT INI SAYA TIDAK MAU PADAHAL INI DAERAH KITA CONTOH EMAS LAH EMAS INI ADA DIDAERAH KITA KITA TIDAK BISA MENIKMATI TIDAK PEMBAGIAN SECARA ORANG PERORANG KITA JUGA SAYA INI SELAMA DIKOTA PALU JUGA DAN SAYA YAKIN BAPAK BAPAK YANG ASLI ORANG PALU ORANG TO KAILI SENDIRI BELUM PERNAH RASA ITU EMAS POBOYA SAYA YAKIN ITU PADAHAL INI MILIK KITA BEGITU NAH INI YANG HARUS KITA PIKIRKAN REGULASI INI ENTAH LETAKNYA DIMANA INI AKAN KITA BAHAS NANTI BEGITU NAH KALAU DARI SAYA ITU DAN MASALAH TEKNISNYA NANTI BISA AKAN MENGIKUTI NAH INI KITA MAU SKORS DULU ATAU MAU TUNDA BESOK ATAU BAGAIMANA

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

IZIN PIMPINAN SARAN SAYA KITA SKORS SAJA SETELAH ITU KITA MASUK LAGI UNTUK PEMBAHASAN KARENA MEMANG PELAKSANAAN JARINGAN UTILITAS INI CUKUP SUDAH MEMAKAN WAKTU YANG KEDUA KALAU DISKORS KAMI BEGITU PADAT PIMPINAN PANSUS DAN KEGIATAN KEGIATAN PEMERINTAH MOHON MAAF PIMPINAN KARENA DEKAT DEKAT INI SEMUA OPD AKAN MEMINTA UNTUK PENYAMPAIAN SOP BELUM LAGI PEMERINTAH SEMUA BAGIAN DISURUH MEMBUAT RENCANA KERJA JADI INI TERLANJUR BANYAK PRESENTASE YANG HARUS KAMI SAMPAIKAN LAPORAN MAKANYA KALAU DIIZINKAN OLEH KETUA PANSUS SETELAH KITA SKORS KITA BAHAS SAMAPAI DIMANA PEMBAHASAN DIDALAM MATERI DARI BATANG TUBUH DARI PERDA INI DISITU NANTI KITA SKORS UNTUK BESOK KITA MELIHAT KONDISI KEADAANNYA KETUA PANSUS MUNGKIN ITU DARI SAYA SEKIAN TERIMA KASIH KETUA

**38.42 H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

OKE BAIK JAM 1 YA 1 JAM YA BOLEH 1 JAM OKE BAIK DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM RAPAT PANSUS INI KITA SKORS DAN KITA AKAN BUKA LAGI KE JAM 1.

**\*\*KETUK PALU 1X\*\***

DILANTAI ATAS DIRUANG UTAMA.

**RAPAT PANSUS II  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU  
RABU, 14 MEI 2025  
Bag II**

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BISMILLAHIROHMANIROHIM SKORSING RAPAT SIDANG INI SAYA CABUT UNTUK ITU KEPADA STAFF SEKERTARIAT SAYA MAU MEMBACAKAN SIAPA, SEBENARNYA BEGINI INI BISA DI STEL MAJU NGGAK INI JUGA BISA? KALAU TIDAK BISA YASUDAH BAIK PAK KABAG, PAK KADIS BISA KITA MULAI? SILAHKAN

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN KONSIDERAN MENIMBANG***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAGAIMANA? LANJUT ?

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN KONSIDERAN MENINGAT DAN BAB I KETENTUAN UMUM***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

CUT DULU SAMPAI DI 7 TADI EH PAK KABAG DAN TEMAN-TEMAN MUNGKIN KITA DI GESER TEMPATNYA INI KEMBALI KE POSISI AWAL DISANA KARENA ADA RAPAT PIMPINAN BERSAMA KAPORLES DISINI JADI KITA BERGESER DULU LARI DULU YA KITA SKORSING UNTUK DI GESER 10 MENIT

\*\*KETUK PALU 1X\*\*

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIROHMANIROHIM SKORS SIDANG SAYA CABUT.

\*\*KETUK PALU 1X\*\*

SILAHKAN SEKERTARIAT

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN KONSIDERAN MENINGAT DAN BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 NO 7 S/D 24***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

CEK YA BAIK DALAM BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1 INI MUNGKIN DARI TEMAN-TEMAN ADA YANG MAU DI SANGGAHI KALAU ADA KALAU SAYA JUGA INI SAYA MELIHAT ADA PASAL YANG MENYANGKUT DI SINI ADA DENGAN TERMASUK KETENTUAN INI YANG MENYANGKUT LISTRIK TADI EH PLN ITU YANG PERTAMA YANG KEDUA MENYANGKUT DENGANSISTEM OSS JUGA NAH NANTI SEPerti YANG KITA KATAKAN TADI JANGAN SAMPAI KETIKA INI TERJADI INI SUDAH JALAN RANPERDA INI KITA TIDAK BISA MELAKUKAN APA-APA KARENA ADA SESUATU HAL YANG TIDAK MASUK DALAM PERATURAN DAERAH INI SEHINGGA MELEMAHKAN ATAU MEMATAHKAN APA YANG MENJADI KEWENANGAN KITA DI PEMERINTAH KOTA PALU MUNGKIN KITA BUTUH TELAAH BAIK-BAIK INI YANG TERUTAMA YANG MENYANGKUT PLN JUGA INI PLN INI KAN AGAK SEDIKIT SUSAH NAH KEMARIN KAN PAK WALI KOTA ADA KETEMU DENGAN PLN MEMBAHAS INI KITA TIDAK TAU PAK PAK KABAG APAKAH MEREKA JUGA SETUJU KETIKA KITA

MAU SATUKAN DALAM SATU SISTEM DI UTILITAS ATAU TIDAK NAH KITA JUGA BUTUH PENJELASAN INI GITU KARENA JANGAN SAMPAI PLN INI BERDIRI SENDIRI DI SPOT-SPOT YANG AKAN KITA BUAT UTILITASNYA BEGITU MUNGKIN DARI IBU RUSTIA ATAU PAK ERMAN ADA MASUKAN ?

**ERMAN LAKUANA, S.Sos (ANGGOTA PANSUS)**

YA TERIMA KASIH PIMPINAN SAYA INGIN BERTANYA TENTANG PENGERTIAN JARINGAN UTILITAS TERPADU INI KARENA SAYA CARI-CARI INI ADA PERBEDAAN SEPERTI JAKARTA KEMARIN NAH KALAU DI JAKARTA KAN JELAS DIA KALAU UTILITAS TERPADU ITU DIA JARINGAN BAWAH TANAH PENJELASANNYA NAH SAYA LIAT JUGA PERDA DI TANGERANG BEGITU JUGA DIA BAWAH TANAH TERUS DEPOK PUN BEGITU PENGERTIANNYA DIA DI BAWA TANAH NAH KITA SAMAKAN DULU PERSEPSINYA INI UNTUK PENGERTIAN JARINGAN UTILITAS TERPADU APAKAH INI MEMANG SUDAH BEGINI TERUS TIANG-TIANGNYA DARI MANA UNTUK PENGERTIAN INI KARENA KALAU MELIHAT PERBANDINGAN KAN JELAS KITA MELIHAT PERBANDINGAN JUGA BEDA-BEDA PENGERTIAN JARINGAN UTILITAS TERPADU, IYA TERIMA KASIH PIMPINAN

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IBU RUSTIA ADA PAK KABAG IYA COBA KITA BUTUH PENJELASAN PAK

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

BAIK TERIMA KASIH YANG KAMI HORMATI KETUA PANSUS DAN ANGGOTA PANSUS YANG PERTAMA MUNGKIN KETENTUAN UMUM INI ADA HAL YANG PERLU DI LIHAT MUNGKIN KAMI ADA DALAM MENULIS ADA PAS EH DI BUTIR KE 10 INI DAN 14 KERJA SAMA DAERAH INI ADA TERJADI DOBOL PENULISAN ADA DI 14 JUGA KERJA SAMA DAERAH JADI 10 DAN 14 ITU DEFINISI SECARA UMUM ITU SEBENARNYA SAMA MAKANYA MUNGKIN ADA PENULISAN YANG PERLU DI LAKUKAN PERBAIKAN KARENA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PENJELASANNYA DENGAN DI POIN 10 JUGA ITU SAMA LANJUT BERKENAAN DENGAN PLN TADI YANG DI SAMPAIKAN OLEH KETUA PANSUS MEMANG INI BUKAN MENYANGKUT PLN SECARA JUGA DI DEFINISI UMUM INI TETAPI ME UTI LISTRIK INI ADALAH PENJELASAN UMUM MENYANGKUT HAL-HAL YANG DI MAKSUD DENGAN UTILITAS YAITU FASILITAS MENYANGKUT KEPENTINGAN UMUM, LISTRIK, TELEKOMUNIKASI, INFORMASI, AIR, MINYAK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAIN-LAINNYA SANITASI ITU PENGERTIAN PAK MAKANYA DI KETENTUAN UMUM ITU LEBIH MENGGAMBARAKAN APA YANG DI MAKSUD DENGAN UTILITAS DENGAN PENJELASAN YANG ADA BERKENAN DENGAN YANG PERTANYAAN YANG TERHORMAT TADI PAK IMAM TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU MEMANG DI BEBERAPA OPD REFERENSI YANG KAMI AMBIL DAN JARINGAN UTILITAS TERPADU INI MEMANG KAMI COBA CARI BEBERAPA HAL YANG ADA DI BEBERAPA REFERENSI DI GAMBARAN UMUM APA YANG DI MAKSUD DENGAN JARINGAN UTILITAS TERPADU KAMI MENDATAKAN REFERENSI INI ADALAH HASIL PELUNASI YANG BERKAITAN DENGAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENETAPAN JARINGAN UTILITAS DAN PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS MAKANYA REFERENSI INI MENJADI PENJELASAN APA YANG ADA NANTI DI BATANG TUBUH APA YANG DI MAKSUD DENGAN JARINGAN UTILITAS TERPADU MAKANYA INI LAH MUNGKIN KAMI SAMPAIKAN MAKANYA DALAM HAL INI REFERENSINYA KAMI BAHWA MEMANG AMBIL BEBERAPA DAN DOWNLOAD DI BEBERAPA REFERENSI KAMUS SEHINGGA TERJADI PERBEDAAN PENAFSIRAN MUNGKIN DENGAN YANG ADA DI

DAERAH-DAERAH YANG DI MAKSUD JARINGAN UTILITAS TERPADU MAKANYA INI YANG DI MAKSUD DENGAN JARINGAN UTILITAS TERPADU YANG KAMI DAPATKAN REFERENSI NYA ADALAH HASIL YANG ADA TERJEMAHKAN DI KETENTUAN UMUM YANG DIJELASKAN APA YANG DI MAKSUD DENGAN JARINGAN UTILITAS TERPADU MUNGKIN REFERENSI YANG DIA PAKAI MELALUI PAK IMAM JUGA APA YANG DI MAKSUD DENGAN UTILITAS TERPADU DI BEBERAPA DAERAH KAMI JUGA BELUM NANTI KAMI LIHAT JUGA YA BAHKAN DENGAN YANG PAK IMAM ITU ADA MUNGKIN DAPAT DI TANGSEL BERKENAN UTILITAS TERPADU JUGA MENJADI REFERENSI JUGA KALAU MEMANG KETENTUAN YANG DI SAMPAIKAN ITU ADALAH JARINGAN BAWAH ATAS TANAH YANG SEMUANYA DI DALAM SATU KESATUAN YANG SALING BERKONEKSITAS ITU YANG MUNGKIN REFERENSI YANG DI BUAT MAKANYA KAMI AMBIL INI MELALUI BEBERAPA REFERENSI DAN EBEBRAPA PENGERTIAN DALAM KAMUS MUNGKIN ITU JAWABAN KAMI BERKENAN DENGAN PENGERTIAN JARINGAN UTILITAS TERPADU MUNGKIN KALAU ADA REFERENSI KAMI COBA JUGA NANTI KALAU MEMANG ADA REFERENSI TAPI INI YANG KAMI DAPATKAN REFERENSI YANG BERKENAN JARINGAN UTILITAS TERPADU TIDAK LEBIH SPESIFIKNYA YANG DI BILANG HARUS TERKONESITAS ITU BIASANYA PEMAHAMAN, PEMAHAMAN-PEMAHAMAN TENTANG UTILITAS TERPADU JADI BISA KITA LIHAT BERSAMA KALAU ADA KAMUS BAHASA INDONESIA YANG BAIK APA YANG DI MAKSUD DENGAN JARINAGN UTILITAS TERPADU MUNGKIN REFERENSI INI YANG MENJADI DASAR KAMI JUGA DALAM PENYUSUNAN PERDA PENYELENGGARAAN UTILITAS MUNGKIN ITU PENYELESAIAN, PAK KADIS SILAHKAN IYA CUKUP TERIMA KASIH

#### **H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IYA BAIK PAK KABAG, INI PAK KABAG BERKAITAN DENGAN POIN 10 DAN 14 TADI INI KATA-KATANYA SAMA INI NAH HANYA PERLU DI SINI KITA TEKANKAN PAK KABAG EH PERTIMBANGAN YANG ADA DALAM PEMAHAMANNYA TEMAN-TEMAN INI PAK KABAG JANGAN SAMPAI DALAM PROSES KERJA SAMA INI KITA PIHAK PEMDA MELAKUKAN INVESTASI DANA JUGA TETAPI DI SINI YANG DI MAKSUD DALAM MELAKUKAN EFISIENSI EFEKTIVITAS JARINGAN PUBLIK DI SINI YANG SALING MENGUNTUNGGAN INI ARTINYA BEGINI KALAU MEMANG SISTEM KERJA SAMA INI MAKSUDNYA DI SINI KITA LEBIH TEKANKAN BARANGKALI DALAM INVESTASI INI KITA TIDAK MENGGUNAKAN DANA APBD KITA SUDAH MEMBAHAS INI SOALNYA DARI KEMARIN-KEMARIN INI JADI BAHASAN YANG SENSITIF KARENA TEMAN-TEMAN MENGGANGGAP INI BIAYANYA AKAN SANGAT MAHAL NAH INI AKAN KITA MASUKKAN DI MANA NANTINYA INI AKAN KITA MASUKAN DI MANA JADI BARANGKALI PAK KABAG MOHON PENJELASAN TERIMA KASIH

#### **MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

BAIK TERIMA KASIH PAK KETUA PANSUS IZINKAN KAMI KEMBALI MENJELASKAN KERJA SAMA DAERAH, KERJA SAMA DAERAH INI SEBENARNYA DI ATUR DALAM PP 28 2018 PERMENDAGRI 22 TAHUN 2020 KERJA SAMA DAERAH ITU ADA 3 HAL KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN, KERJA SAMA DAERAH DENGAN SWASTA, KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN LUAR NEGERI NAH MEMANG DALAM KONSIDERAN KERJA SAMA DAERAH ITU DEFINISIKAN INI KETENTUAN UMUM INI MASIH KITA BICARA DI DEFINISI PAK DEFINISI BERKENAN DENGAN PENGERTIAN KERJA SAMA DAERAH MAKANYA DEFINISI INI YANG MENJADI HAL-HAL YANG MUNGKIN TIDAK LEBIH GAMBARAN UMUM YANG DI MAKSUD OLEH PAK KETUA BERKENAN DENGAN TADI MEMANG PENEKANAN PEMBIAYAAN YANG

TADINYA YANG KALAU BISA PEMBANGUNAN PELAKSANAAN INI TIDAK MASUK DI DALAM APBD KITA ITU NANTI MASUK DI PEMBIAYAAN DI DALAM MATERI BATANG TUBUH INI ADA PEMBIAYAAN PAK PEMBIAYAAN ITU NANTI MASUK DI SITU KEMARIN SAYA SUDAH DISKUSI PEMBIAYAAN ITU NANTI HANYA DUA PAK PEMBIAYAAN DARI APBN DENGAN PEMBIAYAAN DARI PIHAK LAIN YANG PUNYA HUBUNGAN ITU MAKA TIM PEMBIAYAAN BERKENAN DENGAN APBD SESUAI DENGAN APA YANG DI SAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN KE KABAG MUNGKIN ITU MENJADI TIDAK ADA DALAM REGULASI INI NAH KARENA KITA JUGA AKAN COBA NANTI MENDORONG MISALNYA KEMARIN KAMI DAPAT DUKUNGAN ANGGARAN DARI BALAI JALAN TENTANG PERBAIKAN JARINGAN SARANA PRASARANA YANG AKAN COBA DI TATA DI MUHAMMAD YAMIN ITU DUKUNGAN APBN OLEH BALAI JALAN MAKA KAMI TETAP MEMASUKAN APBN TETAPI MEMASUKKAN JUGA PIHAK LAIN YANG PUNYA KEPOTENTEN YANG TADINYA YANG INGIN JUGA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS DI PEMERINTAH KOTA PALU MAKANYA APBDNYA YANG MENJADI KEKHAWATIRAN DALAM KETENTUAN YANG KALAU KITA MASUK KE DALAM PEMBAHASAN DI DALAM PEMBIAYAAN ITU AKAN BERDAMPAK NANTI AKAN KITA SEGERA LAKUKAN PERUBAHAN APBD MENJADI APBN DAN PIHAK-PIHAK LAIN MUNGKIN ITU JAWABAN DARI KABAG HANYA MEMANG 10 DAN 14 INI KERJA SAMA DAERAH KAMI MOHON MAAF TERJADI 2X PENULISAN SEHINGGA DEFINISI INI YANG MUNGKIN NOMOR 10 TETAP ADA NOMOR 14 ITU MUNGKIN MENJADI CATATAN YANG DI HILANGKAN KARENA KITA DARI UMUM KE KHUSUS ITU YANG MENJADI KETENTUAN UMUM YANG MENJADI DASAR DALAM PEMBUATAN PERDA MENGACU PERMENDAGRI 80 DAN PERMENDAGRI 120 SEKIAN DAN TERIMA KASIH PIMPINAN

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK KITA LANJUT KE PASAL 2 SILAHKAN DI BACA

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN PASAL 2 SAMPAI PASAL 9 AYAT (5)***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

UNTUK AYAT BAB 2 ADA YANG MAU DI SANGGAH ? YA SAYA KIRA MEMANG DISINI SETIAP PENGGUNA UTILITAS DALAM HAL PROVIDOR HARUS MENYAMPAIKAN DIA PUNYA RENCANA KERJA JUGA KARENA SUPAYA KITA TAU APA YANG MAU DIA LAKUKAN DI TAHUN BERJALAN MUNGKIN APAKAH PASALNYA INI PERLU DI PERTEGAS LAGI INI PAK KABAG ATAU BAGAIMANA TENTANG PENYAMPAIAN PERENCANAAN JARINGAN UTILITAS INI ?

**ISMAYADIN (SEKDIS PU)**

YA TERIMA KASIH SAYA LANGSUNG SAJA EMANG BETUL SEKALI TERKAIT DENGAN PERENCANAAN JARINGAN UTILITAS INI SETIAP UNTUK MEMAPARKAN KARENA MAKANYA SAYA SAMPAIKAN YANG KEMARIN-KEMARIN ITU KAMI HANYA MENDAPATKAN LAPORAN BAHWA MEREKA SECARA ADMINISTRASI SUDAH TERPENUHI TETAPI SECARA PAPARAN TEKNIS ITU MUNGKIN MEREKA TIDAK BISA MEMAPARKAN SEHINGGA DENGAN ADANYA ATURAN SEPERTI INI ITU PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PALU BISA DI REKOMENDASIKAN WALAUPUN SUDAH MELALUI SISTEM MOHON MAAF OSN ITU KAN HANYA SISTEM OKE NDA 35:04 SUDAH DI SETUJUI TETAPI SECARA TEKNIS PENERAPANNYA ITU YANG PERLU NAH KETIKA MEREKA TIDAK MAMPU MENJELASKAN SECARA TEKNIS

MUNGKIN KAN OSS INI BEGINI KETIKA OPD TEKNIS APAKAH SECARA OSS MUNGKIN SUDAH TERPENUHI TETAPI SECARA TEKNIS KARENA BISA MEREKOMENDASIKAN APAKAH BISA DIA LANJUTKAN ATAU TIDAK NAH KETIKA MEMANG TIDAK ADA YANG DI MAKSUD DENGAN APA ATURAN YANG KITA SUDAH TETAPKAN MUNGKIN KARENA OPD TEKNIS DENGAN OPD LAINNYA YANG BERAKAITAN BISA TIDAK MEREKOMENDASIKAN DALAM HAL INI MUNGKIN INI MENURUT SAYA PERLU SEKALI KARENA KALAU DI DETAILKAN MUNGKIN NANTI SAYA TIDAK TAU SEPERTI APA KARENA SETIAP PROVIDOR INI VENDOR INI PUNYA APA NAMANYA PETUNJUK TEKNIS MASING-MASING TETAPI PETUNJUK TEKNIS ITU KALAU KITA KAITAKAN ATURAN PEMERINTAH PUN JUGA KENA MISALNYA KEDALAMANNYA SEPERTI APA KAN SEPERTI ITU JARAK TIANG NYA SEPERTI APANAH YANG JADI PERSOALAN INI KETIKA INI MISALNYA KITA SUDAH TETAPKAN TIBA-TIBA ADA PERMOHONAN KARENA KEMARIN-KEMARIN SAMPAI TAHUN DEPAN ITU KEMUNGKINAN VENDOR-VENDOR ITU AKAN MASUK KE PEMERINTAH KOTA ARTINYA BUKAN DALAM HAL KITA MENCEGAH KARENA INI PROGRAM PEMERINTAH JUGA SEHINGGA MUNGKIN YANG DI SAMPAIKAN BAB 2 INI BUKAN HANYA PU DISITU ARTINYA ADA OPD-OPD LAIN YANG SALING KETERKAITAN SEHINGGA KITA BISA Mencari titik temunya ini bisa berjalan sesuai dengan ini kita mendukung juga program pemerintah pusat mungkin seperti itu

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

IJIN PAK KETUA IYA SAYA TAMBAHKAN SEDIKIT PENJELASAN KADIS PU SEBENARNYA MEMANG INI DI DALAM PASAL 9 SEBENARNYA DI KETENTUAN INI SEBENARNYA MENGGAMBARAKAN BAHWA PERENCANAAN YANG DISUSUN OLEH VENDOR-VENDOR HARUS TERINTREGITAS APA TERKONEKSITAS DENGAN PEMERINTAH KOTA PALU MAKANYA DALAM PERENCANAAN YANG DISUSUN OLEH PARA PELAKU USAHA ITU SUDAH MASUK DI DALAM PASAL 9 INI MEREKA HARUS MENYAMPAIKAN PROGRAM KEGIATAN MEREKA DALAM KURUNG WAKTU 5 TAHUN JADI PESANGON DENGAN INSTANSI YANG TERKAIT SAMA-SAMA NANTI AKAN MENYUSUN MASTERPLANE PROGRAM UNTUK JARINGAN TERPADU JADI DIDALAM INI AKAN NANTINYA DUDUK BERSAMA UNTUK MENYUSUN SAMA-SAMA SEHINGGA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ITU BUKAN SETIAP SAAT TERJADI PEMBOKARAN KANAN KIRI JADI MEREVISI MEREKA KITA SUSUN BERSAMA SEHINGGA MEREKA NANTI AKAN MENYAMPAIKAN PROGRAM KITA KEDEPANNYA APA YANG MEREKA AKAN LAKSANAKAN 5 TAHUN KEDEPAN TIDAK SETIAP SAAT MEREKA INI TIBA DI DALAM PROGRAM MEREKA TIBA MEREKA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KITA MAKANYA BERSAMA-SAMA NANTI INSTANSI TEKNIS KITA MEMBUAT MASTERPLANE PERENCANAAN UTILITAS TERPADU INI MAKANYA NANTI MEREKA SANGAT PENTING MENYAMPAIKAN DALAM KURUNG SATU TAHUN SEBELUM ANGGARAN BULAN DESEMBER MEREKA SUDAH MENYAMPAIKAN UNTUK KEGIATAN DI TAHUN BERIKUTNYA MAKANYA INI TIDAK AKAN NANTI APA YANG TERJADI DI KOTA PALU INI BARU DI PERBAIKI SEHARI DUA HARI SEBULAN EH DATANG ORANG DALE KARENA ALASAN MEREKA JUGA PUNYA PROGRAM YANG DISITU MAKA ITU TIDAK BEGITU LAGI PAK PIMPINAN KETUA DAN ANGGOTA PANSUS SAMA-SAMA NANTI KITA MENGAWASI ITU KARENA WATAKAN DI PERENCANAAN KALIAN TIDAK ADA MENYAMPAIKAN ITU KEPADA PEMERINTAH KOTA PALU MAKANYA MEREKA JUGA PUNYA DESAIN DENGAN KONDISI UNTUK MEREKA SIAPKAN 5 TAHUN KEDEPAN BUKAN UNTUK MEREKA NANTI DI TAHUN YANG BERSAMAAN MEREKA BILANG INI PROGRAM YANG HARUS KAMI

LAKSANAKAN ITU TIDAK LAGI BEGITU PAK MAKANYA DI DALAM PELAKSANAAN INI BETUL-BETUL ANTARA OPD DAN PIHAK SWASTA MENGGOLABORASI BERKOMUNIKASI MAKANYA DI PERENCANAAN DALAM SISTEM MASTERPLANE ITU KITA SUDAH BISA MELIHAT TAHUN INI INI YANG KITA AKAN LAKSANAKAN TAHUN BERIKUT INI AKAN KITA LAKSANAKAN KALAU DIA NANTI TERJADI PERUBAHAN MASTERPLANE DIA MENYAMPAIKAN KALAU DI KETENTUAN INI 6 BULAN SEBELUM DIA MELAKUKAN DIA HARUS MENYAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH MAKANYA DALAM PERDA PENYELENGGARA JARINGAN UTILITAS INI KITA INGIN MENATA SEMUA YANG ADA DI KOTA PALU LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA ITU TAMBAHAN DARI KAMI PIMPINAN KETUA PANSUS SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

#### **H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK SAYA SEDIKIT MENYANGGAH PAK KABAG SAYA JUGA MEMANG TIDAK SETUJU KETIKA SUDAH ADA YANG BAGUS TERUS DATANG LAGI DI GANGGU ATAU DI BONGKAR NHA KIRA-KIRA DALAM KETENTUAN NANTI INI APAKAH MUNGKIN PERLU DI CATAT SAYA MELIHAT INI SANKSI-SANKSI INI MASIH DI MUNGKIN YANG BERKENAN DAN SANKSI INI MASIH BELUM KENA TENTANG KETIKA MEREKA BEGINI JALAN MISALNYA SAMRATULANGI JALAN SAMRATULANGI INI BELUM KENA DALAM JARINGAN UTILITAS NAH TETAPI MEREKA PADA WAKTU ITU TIDAK MAU NAH SEHINGGA JALAN ITU SUDAH BAGUS DAN RAPI SUDAH DI BUAT NAH TIBA-TIBA MEREKA MENGUSULKAN UNTUK MEMASUKAN JARINGAN DISITU SEHINGGA YANG SUDAH BAGUS TADI MISALNYA DI JALAN SAMRATULANGI TADI INI HARUS DI BONGKAR NAH ADA TIDAK DALAM PEMBAHASAN INI KITA MENGENAKAN MEREKA SEBAGAI SANKSI JADI KALAU YANG SUDAH BAGUS TIBA-TIBA MEREKA MENGUSULKAN UNTUK DI BONGKAR LAGI SATU CONTOH BANYAK LAH SEPERTI KABEL-KABEL TELKOM YANG SERING TERJADI SEKARANG INI TERMASUK GALIAN PIPA PDAM ITU KAN SUDAH BAGUS JANGAN LAGI DATANG LAGI SALURAN AIR GALI LAGI JADI TIDAK KARU-KARUAN SUDAH JALAN INI ADA NDA DALAM DRAFT RANCANGAN PERDA INI KETIKA TERJADI BEGITU KITA AKAN KENAKAN SANKSI MEREKA ATAU TIDAK BEGITU ARTINYA KITA TETAP MEMBOLEHKAN MEREKA TETAPI SANKSI ITU MEREKA WAJIB MEMBAYAR MISALNYA 5X LIPAT KARENA YANG DI RUGIKAN INI PAK KETIKA TERJADI PEMBONGKARAN ITU YANG DI RUGIKAN ITU BUKAN HANYA PEMDA TAPI MASYARAKAT PENGGUNA JALAN JUGA ITU AKAN TERGANGGU PAK JADI MEREKA HARUS MEMBAYARKAN SANKSI ITU ADA NDA DALAM RANCANGAN INI MAKASIH .

#### **MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

JADI SAYA MELANJUTKAN APA YANG PAK KABAG HUKUM SAMPAIKAN TADI TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU YANG SAYA BACA-BACA INI TETAP ADA JARINGAN BAWAH TANAH CUMAN KITA PAKAI LAH INI SUPAYA LEBIH MEMUDAHKAN ISI DI DALAM PASAL-PASAL INI NAH TERUS TERKAIT DENGAN PASAL 9 INI KAN DISEBUTKAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI SUB URUSAN PEKERJAAN UMUM BERSAMA INSTANSI MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT MEMBAHAS PROGRAM KERJA TAHUNAN RENCANA PENEMPATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) NAH INI KALAU DILIAT PASAL 7 AYAT (1) SETIAP INSTANSI YANG MERUPAKAN JARINGAN DIKOTA KOTA HARUS MENYAMPAIKAN PROGRAM TAHUNAN PERENCANAAN JARINGAN UTILITAS KEPADA WALIKOTA MELALUI PERANGKAT DAERAH YANG MEMINANGI URUSAN SUB URUSAN PEKERJAAN UMUM NAH SETIAP PENGAMBILAN

KEPUTUSAN RENCANA KERJA INI MEMANG CUMAN INSTANSI DAERAH SAJA YANG DI LIBATKAN ATAU ADA YANG VERTIKAL JUGA KARENA INI KAN PASTI AKAN BERHUBUNGAN DENGAN JALAN NASIONAL, JALAN PROVINSI ATAU PIHAK TERKAIT LAINNYA SEPERTI PLN JUGA TERUS DAN LAINNYA NAH KALAU KITA MERENCANAKAN SESUATU TERUS TIDAK MELIBATKAN YANG LAINNYA KAN INI BERARTI SEPIHAK ATAU CONTOH KECIL LAH DI PERUMAHAN NAH KALAU KITA BANGUN KALAU PERDA INI DI SAHKAN RANPERDA INI DI SAHKAN BERARTI KEDEPAN PERUMAHAN ITU WAJIB SUDAH PERUMAHAN YANG AKAN DI BANGUN SUDAH WAJIB UTILITASNYA BERARTI DIA MUNGKIN DI BAWAH TANAH KAH ATAU DI ATAS INI YANG SAYA BELUM TAU KEWAJIBANNYA NANTI KEDEPAN KALAU UNTUK YANG DI ATAS YANG BAGAIMANA YANG DI BAWAH BAGAIMANA NAH APAKAH INI NANTI TIDAK INI MAKSUDNYA INI NANTI DI BERATKAN KE PIHAK DEVELOPER ATAU DARI PIHAK KETIGA ATAU DARI PEMDA ATAU DI BERATKAN KE PIHAK DEVELOPER BERARTI KITA HARUS MENGUNDANG PIHAK DEVELOPER TERUTAMA YANG RUMAH SUBSIDI MEREKA HARUS TAU BAHWA PBB AKAN DI SAHKAN NAH PENGATURANNYA BAGAIMANA APAKAH DORANG MAMPU KEDEPANNYA ATAU TIDAK KITA HARUS PIKIRKAN SEMUA MUNGKIN DARI SAYA ITU PIMPINAN

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IBU RUSTIA

**RUSTIA TOMPO (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH KALAU MENURUT SAYA TUBE PAK KETUA UNTUK MELURUSKAN SEMUA PERMASALAHAN YANG ADA INI OLEHNYA SAYA KATAKAN TADI SEBELUM KITA MEMBUAT PERATURAN SAYA AKAN MENGUNDANG MEREKA UNTUK KE PALU KARENA APAPUN ITU NANTI BELUM BISA KITA MEMBUAT SATU UNDANG-UNDANG KALAU KITA BELUM ADA DARI PIHAK STEKHOLDER SENDIRI MEMBERIKAN GAMBARAN-GAMBARAN SEPERTI APA MANA YANG AKAN DI KATAKAN TADI SEPERTI MELANGGAR YANG BISA INI BISA INI ITU SEMUANYA AKAN BERJALAN SESUAI DENGAN APA YANG DI PERENCANAAN DARI PEMERINTAH KOTA SENDIRI TENTU DALAM HAL INI SEBAGAI INVESTOR KITA AKAN UNDANG MEREKA LANGSUNG KE PALU UNTUK MEMBERIKAN PEMAPARANNYA KARENA APA YANG KITA DAPATKAN KEMARIN YANG ADA DI JAKARTA ITU, ITU BELUM JELAS TETAPI DENGAN PERTEMUAN KAMI YANG TERAKHIR BAHWA SAYA MENGATAKAN MEREKA BENAR-BENAR HARUS MEMPERSIAPKAN TOL KITA BERBICARA MENGENAI MASALAH INVESTOR INI TENTU DALAM HAL INI BAIK KITA LIHAT DARI STEKHOLDER PEMERINTAH DAERAH ATAU DINAS YANG BERKAITAN ATAU PUN ADA TERUTAMA KITA HARUS HADIRKAN JUGA DARI PIHAK ASOSIASI SENDIRI KARENA APA INI BERKAITAN SATU SAMA LAIN BUKAN HANYA ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN APA NAMANYA EH DENGAN INVESTOR SEPERTI DI KATAKAN ADA PERUMAHAN YAH INI TIDAK BISA HANYA MELIBATKAN SATU PIHAK ATAU DUA BELAH PIHAK TENTU DALAM HAL YANG BERKAITAN DENGAN INI SAYA AKAN MENGUNDANG MEREKA LANGSUNG UNTUK KE SINI UNTUK MEMBERIKAN PEMAPARAN DAN KITA HARUS SATU PINTU SEBELUM DIBUATKAN UNDANG-UNDANG YANG KITA PAKAI BERSAMA KARENA MENINGAT BAHWA KEINGINAN KITA INI BANYAK BETOL SEMENTARA DARI PIHAK SANA KAN KITA BELUM TAHU SAYA RASA BEGITU PAK KABAG SAYA KAN MENDATANGKAN MEREKA KALAU KITA SUDAH MEMBAHAS SEMUA INI NDA BISA INI NDA BISA SEMENTARA DARI MEREKA KAN KITA BELUM TAHU TIDAK BISA SEPIHAK SAJA INI PAK HARUS KITA

UNDANG MEREKA KITA DUDUKKAN BERSAMA DI SATUKAN KITA PUNYA PERSEPSI SEPERTI APA KARENA APA TANPA KESEIMBANGAN INI JUGA TIDAK AKAN BISA BERJALAN SESUAI DENGAN APA YANG DI INGINKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAUPUN KITA DI DEWAN SENDIRI ARTINYA KITA HARUS SATU PINTU BUKAN MEMBUAT INI BEGINI KALAU KITA BUAT INI BARANG KITA MENINGINKAN SEPERTI YANG KITA MAU TAPI PIHAK SANA SENDIRI SEPERTI INI ADA SAYA LIHAT PERJANJIAN LIMA TAHUN SETAHUN DI RUBAH PADA BULAN DESEMBER APA TAPI KAN KITA BELUM MEMBICARAKAN HAL-HAL SEPERTI INI YANG INTINYA ITU KITA BENAR-BENAR HARUS FACE TO FACE DENGAN MEREKA APA YANG DIA MAU DAN APA YANG KITA MAU NAH DI SINI BARU KITA LIHAT OH INVESTOR INI MAUNYA SEPERTI INI SAYA RASA BEGITU PAK KABAG, TERIMA KASIH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IYA PAK KABAG BAGAIMANA MAU DI TANGGAPI DULU

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

BAIK TERIMA KASIH PERTANYAAN YANG PERTAMA MUNGKIN DARI KETUA PANSUS SENDIRI BERKENAN DENGAN PERTANYAAN TADI APAKAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS INI MELIBATKAN INSTANSI MANA SEMUA NAH MAKANYA ITU TADI SAYA SUDAH SEBUTKAN LEBIH AWAL BAHWA DALAM HAL PELAKSANAAN RENCANA INDUK YANG AKAN DI SUSUN 49.55 PLAN ITU MEMANG AKAN MELIBATKAN BEBERAPA OPD NAH YAITU ADA DI DALAM INI ADA NAMANYA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ADA SUB URUSAN BERKENAN DAN PENATAAN RUANG ADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN ADA PERHUBUNGAN ADA LINGKUNGAN HIDUP DAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JADI OPD-OPD ITU NANTI BERSAMA-SAMA MEMBUAT RENCANA APA RENCANA INDUK ATAU MASTER PLAN JARINGAN YANG AKAN TERKONEKSITAS SATU-SATU DENGAN YANG LAINNYA JADI TETAPI HARUS ADA YANG BERTANGGUNG JAWAB, BERTANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN MENGGKOORDINIR SEMUA INI ADALAH DI BAWAHI DINAS PEKERJAAN UMUM KARENA INI ADALAH SATU-SATU LEADING SECTOR YANG NANTINYA AKAN MENGERJAKAN YANG BERKONEKSI SISTIMATIKA JARINGAN YANG AKAN INI MAKA INI BUKAN HANYA DI DALAM TANGGUNG JAWAB DINAS PERHUBUNGAN

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

JADI INI KAN KALAU MAU BICARA TERKAIT ITU KAN OPD PERANGKAT DAERAH ITU CUMA MEMUAT UNTUK OPD KOTA PALU PEMDA KOTA PALU TAPI BAGAIMANA DENGAN INSTANSI YANG DI LUAR NAH ITUKAN SEHARUSNYA DI LIBATKAN JUGA DALAM PERENCANAAN INI MASA KITA MEMBUAT SUATU PERENCANAAN TAPI TIDAK MELIBATKAN INSTANSI CONTOH ADA PLN ADA BALAI JALAN NAH SEHARUSNYA ITU KAN DI LIBATKAN SEMUA TAPI DALAM PENGERTIAN PASAL 9 INI MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH NAH SAYA KURANG TAHU KALAU PENGERTIAN PERANGKAT DAERAH INI PENGERTIANNYA APAKAH PERANGKAT DAERAH INI CUMA INSTANSI OPD TINGKAT PEMDA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU ATAU PERANGKAT DAERAH INI SECARA KESELURUHAN PERANGKAT YANG ADA DI DAERAH TERMASUK YANG VERTIKAL ATAU BUMN IYA MAKASIH

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

EH PASAL 9 AYAT 2 INI YANG DI MAKSUD OLEH YANG TERHORMAT PAK IMAM SEBENARNYA INI MENYANGKUT HAL YANG NANTINYA DIA SAMPAIKAN JADI

SETIAP APA VENDOR YANG AKAN MEMBUAT SATU PERENCANAAN PELAKSANAAN JARINGAN UTILITAS DIA HARUS MENYAMPAIKAN MELALUI INSTANSI PEKERJAAN UMUM PENYAMPAIAN TETAPI DALAM PEMBAHASAN ITU MENYANGKUT APA DI SITU ADA MENYANGKUT SKALA RENCANA UTILITAS YANG DI TEMPATKAN DIA ADA SKALANYA SATU BANDING LIMA RIBU JADI NANTI DIA MENYAMPAIKAN BERSAMA-SAMA ITU DI SITU ADA KEBUTUHAN KAPASITAS PENGGUNAAN BARU MENJADI DIMENSI RUANG UTILITAS PERKIRAAN DEFINISI DALAM METODE KERJA 53.12 INI YANG DI SAMPAIKAN PAK JADI TIAP SWASTA SEBELUM DIA MELAKSANAKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUDAH MENYAMPAIKAN RENCANA KERJA TAHUNANNYA ITU KEPADA DINAS PERHUBUNGAN EH MOHON MAAF DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN-PERENCANAAN ITU NANTI AKAN DI BAHAS BERSAMA TADI INSTANSI YANG SAYA BILANG MAKANYA DALAM PERENCANAAN INI ANTARA LIMA INSTANSI YANG BERKOLABORASI DENGAN SWASTA, SWASTA SUDAH MENYAMPAIKAN RENCANA PROGRAM KERJANYA JADI KETERLIBATAN SWASTA ITU DIA SUDAH MENYAMPAIKAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN YANG AKAN DIA AKAN LAKSANAKAN DI PEMERINTAH KOTA PALU MAKANYA DALAM HAL ITU KETERLIBATAN NYA ITU MASUK DI DALAM PASAL 9 INI DIA SUDAH MENYAMPAIKAN PAK NAH DI SITULAH PEMBAHASAN-PEMBAHASAN ITU NANTI NYA AKAN MENJADI GAMBARAN BAHWA PIHAK SWASTA SUDAH MENGETAHUI DAN SUDAH MENYAMPAIKAN DAN PEMERINTAH SUDAH MENDESAIN DALAM MASTER PLAN NAH MAKANYA BUKAN TIDAK DI LIBATKAN SAMA-SAMA SUDAH DI BAHAS DIA SUDAH DI SAMPAIKAN MAKANYA DI SINI NANTI ADA DI DALAM AYAT 4 NYA PALING LAMBAT AKHIR BULAN DESEMBER MAKANYA MEREKA SUDAH MAKANYA DI TAHUN BERIKUTNYA SUDAH DI TAU BAHWA SWASTA NISASI YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN-PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS ITU ADALAH PERUSAHAAN A PERUSAHAAN B PERUSAHAAN C MAKA TIDAK AKAN MENGGANGGU PEKERJAAN DAN INI AKAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN MASTER PLAN MAKANYA NANTI MEREKA TIDAK DI TINGGALKAN MEREKA SUDAH MEMBUAT PERENCANAAN BEGITU SEMUA APAKH ITU NANTI DARI VENDOR-VENDOR YANG ADA MAKANYA DI SINI ADALAH MEREKA RUANG DIMANA MEREKA AKAN MENYAMPAIKAN RENCANA KERJA MEREKA NANTINYA DENGAN PEMERINTAH ITU AKAN DUDUK BERSAMA MENYUSUN DESAIN INI TIDAK DI TINGGALKAN MEREKA MAKANYA MEREKA ADA DI SINI MENCANTUMKAN SKALA SATU BANDING 5000 JADI DIA SUDAH MEMBUAT DESAIN OH SAYA MAU MASUK KE DAERAH INI INI DIA SUDAH MENYAMPAIKAN JADI MEREKA TIDAK DI TINGGALKAN TETAP NANTI AKAN SAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAH DUDUK BERSAMA MERENCANAKAN BERSAMA DAN MENGHASILKAN SUATU APA SISTEM DENGAN MASTER PLAN BERSAMA DAN INI ADALAH SUATU HAL YANG BERSAMA-SAMA DI SUSUN TIDAK SALING MENINGGALKAN SATU SAMA LAIN MAKANYA INI MERUPAKAN SUATU HAL YANG MENJADI REGULASI YANG SAMA-SAMA NANTI DI SUSUN KE DEPANNYA PAK IMAM YANG TERHORMAT

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

NANTI DARI PERANGKAT DAERAH INI APA

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JADINYA DI TUNJUK SALAH SATU YANG BERTANGGUNG JAWAB MAKANYA INI KAN ADA TADINYA SAYA BILANG DI PASAL BERIKUTNYA

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

JADIKAN INI PROVIDER ATAU PIHAK LAIN DIA MENGUSULKAN RENCANANYA NAH PIHAK DARI PEMDA BERSAMA INSTANSI YANG LAIN PASAL 9 AYAT 1 MELIBATKAN PERANGKAT DAERAH YANG LAIN MEMBAHAS BERSAMA INI YANG USULAN TADI ITU DI USULAN OLEH PROVIDER ATAU YANG LAINNYA NAH KALAU BEGITU BERARTI KAN DI LIHAT LAGI INI BEGITU DI BAHAS PASTIKAN INI APAKAH INI CUMA MASUK DI JALAN KOTA KAN KALAU MAU BICARA TENTANG JALAN NASIONAL BERARTI ITU ADA PIHAK LAIN LAGI ADA BANYAK JALAN NAH MAKANYA SAYA BERTANYA SAMA PAK KABAG ARTI PENGERTIAN DARI PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH INI APAKAH MEMANG CUMA OPD PEMDA PEMERINTAH DAERAH KOTA ATAU SUDAH TERMASUK YANG VERTIKAL VERTIKAL INI BERJALAN APAKAH BALE JALAN JUGA DI LIBATKAN NAH KALAU YANG SEPERTI PAK KABAG SAMPAIKAN TADI BALE JALAN INI TIDAK DI LIBATKAN NAH DIA INI BUKAN PENGUSUL LOH, PENGUSUL TADI INI PROVIDER SWASTA SEDANGKAN BALE JALAN INI DIA PEMILIK JALAN NASIONAL SAMA JUGA JALAN PROVINSI ADA DINAS YANG TERKAIT NAH ITU MAKSUDKU PENGERTIAN DARI INI PASAL 9 AYAT SAT BISA DI TAMBAHKAN LAH BAGAIMANA CARA PENAMBAHAN NYA SUPAYA INI LEBIH JELAS LAGI NAH KALAU CUMA PERANGKAT DAERAH TERKAIT SEDANGKAN ADA PIHAK-PIHAK LAIN YANG HARUS IKUT SERTA DALAM PENETAPAN INI KALAU KITA BUAT PERENCANAAN DI JALAN NASIONAL ATAU JALAN PROVINSI IYA TERIMA KASIH PIMPINAN

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK PAK KABAG MUNGKIN BISA DI SANGGAH

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

BAIK EH TERIMA KASIH PAK IMAM BERKENAN DENGAN PENYAMPAIAN PAK IMAM TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG DI MAKSUD ADALAH PERANGKAT DAERAH DI DUA PEMERINTAH YA YANG SEPERTINYA MEMANG KALAU KITA MENDUDUKAN REGULASI BIASANYA MOHON MAAF PAK IMAM MENDUDUKAN REGULASI INI SEBENARNYA REGULASI INI DI BUAT UNTUK MENATA PEMERINTAH EH APA PEMERINTAH KOTA PALU TETAPI MEMANG DALAM KEWENANGAN, DALAM KEWENANGAN INI BANYAK KEWENANGAN JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI ITU KEWENANGAN PAK TAPI BERKENAN DENGAN SISTEM MEMANG SISTEM INI YANG NEGARA KITA INI PAK DI DALAM NEGARA KITA ITU DALAM TATANAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN SEBENARNYA PERDA ITU ADALAH SATU REGULASI UNTUK MENGATUR BERKENAN DENGAN APA YANG PERLU MENJADI TATANAN YANG NORMA YANG PERLU MENJADI RAMBU-RAMBU ORANG DALAM MELAKSANAKAN SESUATU NAH TAPI KARENA KITA BICARA KEWENANGAN TADI PAK IMAM KEWENANGAN MEMANG KEWENANGAN YANG ADA DI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI ITU BERBEDA MASING-MASING NAH INI YANG MUNGKIN JUGA MEMANG KITA DALAM JARINGAN UTILITAS INI KAMI MENCAKUP TIDAK MELIHAT TENTANG KEWENANGAN ITU TETAPI KITA MELIHAT SESUATU HAL YANG TATA CARA PENGATURANNYA TETAPI TAPI MASUKKAN PAK IMAM TENTANG PERANGKAT DAERAH TADI ITU YANG NANTINYA KARENA DI KETENTUAN UMUM KITA MENGATAKAN PERANGKAT DAERAH ITU ADALAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU PERANGKAT DAERAH NAH TETAPI PERANGKAT DAERAH YANG PAK IMAM INI MUNGKIN CAKUPANNYA LEBIH LUAS YANG NANTINYA AKAN MELIBATKAN INSTANSI-INSTANSI VERTIKAL DI LUAR KITA TADI BERDASARKAN KEWENANGAN YA ITU YANG NANTINYA MENJADI CATATAN MUNGKIN PAK KADIS KEWENANGAN INI YANG NANTINYA BAGAIMANA PERTANYAAN INI BAGAIMANA

KALAU DIA BERADA DI WILAYAH KEWENANGAN JALAN PROVINSI ATAU JALAN NASIONAL BAGAIMANA KITA MAU MENGATUR UTILITASNYA ITU KARENA DI SITU YANG HARUS KITA MAU KETEMU DULU TETAPI SEBENARNYA PERDA INI PAK MOHON MAAF KALAU KAMI PERDA INI DI BUAT UNTUK MENGATUR SUATU SISTEM YANG ADA DI SUATU DAERAH TETAPI KARENA DI BATASI KEWENANGAN MAKA RANPERDA ITU SEBENARNYA HARUS MENGATUR STAR TERHADAP REGULASI PERDA TERSEBUT KARENA NORMANYA ADALAH BAGAIMANA TETAPI KARENA KEWENANGAN NYA INI MENJADI KEWENANGAN NASIONAL INI EMNJADI KEWENANGAN PROVINSI KARENA DI BAGI BERDASARKAN JALAN KAN ADA JALAN NASIONAL DENGAN UNDANG-UNDANG 20 ADA JALAN PROVINSI DENGAN KEWENANGAN JALANNYA ITU MAKANYA NANTI SARAN PAK IMAM MUNGKIN JADI CATATAN JUGA DALAM RANGKA KE DEPANNYA INI BAGAIMANA KALAU MEREKA JUGA DI LIBATKAN YANG TERHORMAT PAK IMAM JADI KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH LAIN DALAM JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI MUNGKIN KITA AKAN ATUR SENDIRI BERKENAN DENGAN UTILITAS MEMANG DI SINI BELUM TERATUR PAK BELUM KAMI ATUR ITU JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI TAPI SARAN AKAN KAMI COBA MASUKKAN DI PASAL 9 INI UNTUK KEWENANGAN BERKENAN DENGAN JALAN NASIONAL BAGAIMANA CARA MENGATUR UTILITAS NYA DENGAN JALAN PROVINSI BAGAIMANA MENGATUR UTILITASNYA IYA KARENA SARAN DARI PAK IMAM AKAN MENJADI CATATAN KAMI KE DEPAN MUNGKIN PAK KADIS IYA SILAHKAN

#### **ISMAYADIN (SEKDIS PU)**

TERIMA KASIH TERKAIT DENGAN APA YANG DI SAMPAIKAN PAK IMAM MEMANG BETUL SEKALI KETERKAIT DENGAN KEWENANGAN JALAN MEMANG KAMI ADA BATASAN DIMANA JALAN ITU DI BAGI ATAS TIGA KEWENANGAN YAITU JALAN NASIONAL, YAITU JALAN YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA SATU PROVINSI DENGAN PROVINSI LAIN MISALNYA KALAU KITA SAMPAI DIBANDARA ITU DI LANJUTKAN DENGAN PENERBANGAN SAMPAI DI PROVINSI LAIN BEGITU JUGA DI PELABUHAN FERI PELABUHAN FERI ITU JALAN NASIONAL YANG MASUK KE TAIPA ITU DI HUBUNGKAN KE PROVINSI LAIN TERUS ADA NAMANYA JALAN PROVINSI YANG MENGHUBUNGKAN ANTARA APA NAMANYA KABUPATEN KOTA NAH ADA JUGA NAMA NYA JALAN KOTA ATAU JALAN KABUPATEN YANG KEWENANGAN KABUPATEN DAN JALAN KOTA MEMANG KETERKAITAN DENGAN URUSAN KEWENANGAN SEMUA DAERAH BAIK ITU NASIONAL PROVINSI KOTA TIDAK BISA SALING MASUK KECUALI ADA KETETAPAN SEPERTI INPRES INSTRUKSI PRESIDEN YANG LANGSUNG BISA MENANGANI APBN BISA MENANGANI JALAN KOTA BISA MENANGANI JALAN KABUPATEN NAH TERKAIT DENGAN HAL INI MEMANG BETUL SEKALI KAMI AKAN KOORDINASIKAN JANGAN SAMPAI NANTI TERNYATA DI PROVINSI JUGA ADA TERKAIT UTILITAS JARINGAN UTILITAS SEHINGGA TERJADI APA NAMANYA SALING BERISAN NAH MUNGKIN INI YANG DI MAKSUD KAMI COBA APA PELAJARI KEMBALI APAKAH INI HANYA BERKAITAN DENGAN JALAN STATUS JALAN KOTA KARENA DI SEBUTKAN DI SITU DI KOTA SEHINGGA KETIKA INI PROVIDER INI KAN TIDAK MUNGKIN KETIKA DIA SUDAH MASUK KE JALAN PROVINSI YA ITU URUSANNYA PROVINSI KARENA INI SATU KESATUAN ARTINYA KETIKA JARINGAN PROVIDER APA TELEKOMUNIKASI ITU MASUK DI WILAYAH KOTA PALU DIA TIDAK MELIHAT KEWENANGAN NAH ARTINYA BUKAN BERARTI KETIKA SUDAH MASUK DI WILAYAH PROVINSI ITU BUKAN URUSAN PEMERINTAH KOTA LAGI YANG KHAWATIRAN KAMI JANGAN-JANGAN DI PROVINSI ATAU DI BALAI JALAN TERKAIT APA SALURAN TELEKOMUNIKASI ITU JUGA ADA ATURAN

ATAU PERDA NYA INI KAN AKAN KAMI KOREKSI KEMBALI PAK KABAG YA JADI CATATAN KAMI KETIKA NANTI KAMI KOORDINASIKAN KETIKA MASUK KE WILAYAH PROVINSI BERATI KAMI DALAM HAL PENYUSUNAN MASTER PLAN TENTUNYA SECARA KESELURUHAN APA YANG SECARA KESELURUHAN NAH APAKAH DALAM PENYUSUNAN MASTER PLAN NANTI DI SITU KETIKA BERKOORDINASI MASIH MASUK KE WILAYAH JALAN PROVINSI ATAU JALAN NASIONAL KAMI MENGIKUTI KAIIDAH YANG ADA DI KETENTUAN YANG DI TENTUKAN OLEH JALAN PROVINSI MISALNYA KEDALAMAN JARINGAN KALAU DI BAWA SATU METER STENGAH ITU SUDAH BUKAN KEWENANGAN KALAU KEWENANGAN JALAN PRVINSI ATAU JALAN KOTA DI BAWA SATU METER SETENGAH ITU SUDAH DI KEWENANGAN ITU SUDAH KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ATAS ITU BATASANNYA ITU 5 METER KE SAMPING ITU HAMPIR BATAS RUMIJA NAH KETIKA JARINGAN UTILITAS INI DI BAWA SATU METER STENGAH BERATI PEMERINTAH DAERAH BISA MELAKSANAKAN TETAPI KALAU MASIH DI BAWA ANTARA NOL SAMPAI SATU METER STENGAH ITU BERARTI ITU KEWENANGAN APA NAMANYA KEWENANGAN JALAN SEPERTI ITU NANTI KITA COBA PERJELAS LAGI TERIMA KASIH

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

IYA KALAU BEGITU BAGUS ITU JADI LEBIH JELAS SAJA PENGISIAN DI DALAMNYA CUMA KALAU BISA DIA PUNYA TAMBAHAN AYAT ATAU PASAL NANTI SEBELUM SELESAI PANSUS INI JADI SEBELUM TOKI PALU RANPERDA INI SELESAI DI BAHAS SUDAH HARUS ADA INI

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

IZIN PAK IMAM MAKANYA DALAM PENEKANAN INI KAMI HARUSNYA MENYEBUTKAN DI WILAYAH KOTA PALU YA KARENA DI WILAYAH KOTA PALU HANYA MEMANG KALAU DI WILAYAH KOTA PALU ITU MENCAKUP SEMUA YANG ADA DI KOTA PALU HANYA ITU YANG SAYA BILANG TADI BATASAN DALAM UNDANG-UNDANG 20 TENTANG JALAN ITU DIBAGI TADI ADA JALAN NASIONAL ADA JALAN PROVINSI DAN ADA JALAN KABUPATEN KOTA MAKA BATASAN ITU YANG KITA BATASI JUGA DALAM REGULASI INI MAKANYA REGULASI INI TIDAK PERNAH KERLUAR DARI KORIDOR MENJADI KEWENANGAN KOTA KARENA DI UNDANG-UNDANG 23 2014 JUGA KAMI TIDAK MEMASUKKAN ITU MAKANYA KALAU MEMANG KITA MELIHAT SECARA UMUM ITU KITA MAU ATUR SEMUA TETAPI KITA DI BATASI OLEH GERAK KEWENANGAN PRO PUSAT INI JALANNYA YANG DI SAMPAIKAN OLEH KADIS PU KEWENANGAN PROVINSI INI JALAN NYA KEWENANGAN KOTA INI JALANNYA MAKA REGULASI INI YANG KAMI BUAT INI MASIH CENDERUNG BERBICARA DI WILAYAH OTONOMI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAPI TADI PAK IMAM SUDAH MELIHAT DENGAN KACAMATA UMUM BAGAIMANA KALAU ADA MELINTAS DI ANTARA JALAN PROVINSI DAN JALAN NASIONAL INI MEMANG PERTANYAAN INI MEMANG MENJADI HAL MEMANG KITA SAYA SENDIRI MENJADI KABAG HUKUM BAGAIMANA DIMANA POSISI KEDUDUKAN HUKUM SEDANG INI ADALAH PEMERINTAH KOTA PALU KAN TAPI KITA DI BATASI OLEH UNDANG-UNDANG 23 2012 TENTANG KEWENANGAN MAKANYA DI DALAM KEWENANGAN LAMPIRAN TERAKHIR TENTANG BATASAN KEWENGAN KITA DI BATASI EH BOLEH SAMPE SINI INI TIDAK TAPI SARAN PAK IMAM JADI CATATAN KAMI KEDEPANNYA BAGAIMANA KALAU DIA MELINTAS DI ANTARA JALAN PROVINSI DAN JALAN NASIONAL KAYA GAJAH MADA, GAJAH MADA INI KALAU KITA TIDAK TATA JADI KUMUH PAK KALAU KITA TATA TAPI KALAU KITA MINTA PROVINSI SAMPAI KAPAN PUN PROVINSI

BILANG AH BUKAN SA PE URUSAN YANG BAGUS KOTA PALU SAYA TIDAK BAIK KEMBALI KE KOTA PALU MAKANYA INI PAK MOHON MAAF PAK YANG TERHORMAT ANGGOTA DEWAN SEMUA INI LAH DILEMA PEMERINTAHAN YANG SEKARANG INI KITA MEMANG DI POSISI YANG SALING DILEMA ARTINYA KITA INGIN SATU REGULASI YANG TERBAIK YANG MENGATUR DAERAH KITA TETAPI ADA HAL YANG DI BATASI GAJAH MADA KITA MAU TATA BUKAN KEWENANGAN KITA, KITA MAU RUBAH BUKAN KEWENANGAN KITA MASIH KEWENANGAN PROVINSI TIDAK DI KASIH BAGUS KACAMATA DI DALAM KOTA TIDAK INDAH TIDAK YANG DI SOROTI BUKAN SIAPA-SIAPA YANG DI SOROTI ADALAH PEMERINTAH KOTA PALU TIDAK PERNAH DI BILANG YANG SALAH ITU PEMERINTAH PROVINSI MOHON MAAF YANG TERHORMAT BAPAK IMAM MUDAH-MUDAHAN DENGAN PERTEMUAN INI KITA MENAMBAH WAWASAN INI KARENA INI MEMANG TARIKANNYA DI SITU PAK TARIKAN BERDASARKAN REGULASI DISITU MAKANYA KALAU NANTI INI MASIH ADA HAL YANG PERLU KITA LAKUKAN PENYEMPURNAAN KITA AKAN LAKUKAN PELAN-PELAN PAK ARTINYA REGULASI INI KITA BUAT UNTUK SEGERA MENGATUR YANG SEMRAWUT TADI ITU SUPAYA KITA BISA ATUR PAK YANG SEMRAWUT-SEMRAWUT ITU KITA MAU MASUK TIDAK ADA PINTU MASUK KITA PAK KITA MAU COBA MAKANYA ARTINYA ADA OFF POWER MELAMPAUI KEWENANGAN AKAN SAYA LAKUKAN BUKAN KAU PUNYA KEWENANGAN DI SITU KARENA ITU JALAN PROVINSI KARENA OFF POWER SAYA PUNYA REGULA SAYA MASUK DI SITU BEGITU MUNGKIN ITU ARTINYA KALAU BAHASA ORANG SONONYA BEGITU JADI MELAMPAUI KEWENANGAN SAYA SAYA BISA MASUK YANG BUKAN JADI KEWENANGAN SAYA DI JALAN PROVINSI TADI ITU KARENA KALAU KITA TIDAK ATUR PAK SIAPA LAGI YANG MAU ATUR NANTI YANG DI SALAHKAN KITA-KITA INI PAK PEMERINTAH KOTA DAN LAIN-LAIN MUNGKIN ITU SAJA IYA TERIMA KASIH PAK

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

MAKSUDKU TADI BAGAIMANA DI DALAM PASAL INI INI KAN CUMAN MELIBATKAN TENTANG PERANGKAT DARAH SEPERTI PENJELASAN TADI JDARI PAK KABAG BERARTI CUMAN OPD YANG TERKAIT DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU BISA NDA SARAN NIH DI TAMBAHKAN APABILA ITU MELIBATKAN JALAN PROVINSI NANTI DI UNDANG DINAS TEKNIS TERKAIT ATAU JALAN NASIONAL DI UNDANG DINAS TEKNIS TERKAIT KARENA INI KAN DI BUATKAN DALAM PERATURAN DAERAH JADI HARUS JELAS JUGA JANGAN SAMPAI PADA SAAT PELAKSANAAN NYA PERATURAN DAERAH CUMAN MEMUAT TENTANG OPD TERKAIT PERANGKAT DAERAH TERKAIT NAH ITU KAN BERARTI SUDAH JELAS TIDAK MELIBATKAN LAGI PIHAK DARI PROVINSI ATAU BAIK JALAN MASALAH TADI YA MAKSUDNYA DI MASUKAN LAH DALAM PASAL ADA TAMBAHAN KALAU BELUM BISA SEKARANG YA ANNTI SAMBIL KALAU KITA SKORSING NANTI PAK KABAG BACA-BACA YANG MANA BISA JADI DI MASUKANNYA DI PASAL MANA YANG BISA MASUK NDA PERLU HARUS SEKARANG KAN BELUM SELESAI JUGA INI YA, JADI ITU PERTAMA TERUS TERKAIT DENGAN TADI PERUMAHAN ITU PAK MUNGKIN KALAU PERUMAHAN KOMERSIL KITA MEWAJIBKAN TADI INI UTILITAS TERPADU ENTAH KAH DIA DI BAWAH TANAH DI ATAS TANAH MUNGKIN DIA BISA MAMPU KARENA BEDA HARGA INI KOMERSIAL DENGAN SUBSIDI NAH ITU NAH INI ADA DIA DEVELOPER JUGA DI SAMPING INI PAS-PASA KETUA PANSUS INI DEVELOPER JADI HARUS JELAS SAJA ITU BAGAIMANA PENGATURANNYA MEMANG KAN KALAU DI ATUR BEGITU DIA PENYERAHAN BERARTI ITU SUDAH DI SERAHKAN KE PIHAK PEMERINTAH DAERAH TAPI APAKAH PIHAK RUMAHAN INI DIA MELAKSANAKAN

SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH INI NAH KALAU YANG TERJADI SEKARANG KAN BANYAK PERUMAHAN YANG BELUM MENYERAHKAN ASETNYA TADI PASUNG FASUSNYA MASIH BANYAK PERUMAHAN NAH TAPI ITU KAN MENJADI KEWAJIBAN DARI DEVELOPER SENDIRI SEHARUSNYA TENTANG PEMECAHAN TADI ITU NAH ITU YANG SEMUA HARUS DI KETAHUI KALAU EMANG BAGAIMANA KITA UNDANG JUGA PIHAK DEVELOPER SUPAYA DEVELOPER-DEVELOPER INI TAU YA DARI REI KALAU TIDAK SALAH DI UNDANG PIHAK REI YANG MAMPU NYA YANG MANA NIH KALAU MEMANG DORANG PELAKSANAANYA DI SERAHKAN KE PERUMAHAN NAH INI KAN KEDEPAN PERENCANAANNYA BUKAN DI LAKSANAKAN OLEH TIDAK DI LAKSANAKAN APBD NAH ITU HARUS DI PIKIRKAN JANGAN SAMPAI MEMBUAT ATURAN INI BIAR DRAINASE DI DALAM PERUMAHAN SUDAH TIDAK JADI NANTI YA MAKASIH PIMPINAN.

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

YA TERIMA KASIH PAK IMAM SARAN MASUKANNYA TADI BERKENAN DENGAN BAGAIMANA DENGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG SKALA NYA ITU BISA DI KATEGORIKAN RUMAH SANGAT SEDERHANA ARTINYA YANG DIMANA MEMANG DISINI MEMANG DI DALAM JARINGAN UTILITAS ITU KAN KITA AKAN DUDUK BERSAMA PAK DALAM SISTEM DUDUK BERSAMA ITU NANTILAH DENGAN PERUMAHAN-PERUMAHAN YANG TIPE RSS INI MUNGKIN YA KITA AKAN LIAT KARENA MEMANG UTILITAS TERPADU INI KAN KITA MEMBUAT DESAIN DUA DESAIN JARINGAN BAWAH TANAH CUMAN DESAIN DI ATAS PERMUKAAN TANAH YANG DIMANA DI RUANG DI ATAS TANAH MAKANYA NANTI DI DALAM DESAIN ITU KITA AKAN COBA NANTI SEEFEKTIF MUNGKIN YANG AKAN KITA DUDUK BERSAMA SEHINGGA MEMANG INI BISA MENJADI HAL POSITIF JADI MEMANG TIDAK MENJUSTICE HARUS SEMUA DI BAWAH TANAH KALAU KOS BIAYANYA TINGGI MUNGKIN KITA MENCARI ALTERNATIF YANG DI ATAS SANA TETAPI NANTINYA DIA HARUS SUDAH MENYAMPAIKAN KARENA YANG TADI MOHON MAAF INI SAYA MUNGKIN PERNAH MEMBUAT GAMBARAN BAHWA BAGAIMANA KALAU DIA HANYA DALAM KAPASITAS TIDAK MAKSIMAL RUMAHNYA KALAU PAK ALFIAN CHANIAGO TAU 5 UNIT INI DIGATEKAN DEVELOPER BUKAN DI BANGUN TAPI SUDAH BANGUN YA MAKANYA INI JUGA JADI MUNGKIN HAL-HAL YANG MUNGKIN MENJADI CATATAN JUGA TERSENDIRI DIA JUGA MENYAMPAIKAN PERENCANAAN KE INSTANSI TEKNIS KE PERKIM NANTI KITA DUDUK BERSAMA UNTUK MENDESAIN KARENA MASTERPLANE YANG KITA BUAT INI ADALAH MASTERPLANE BERSAMA JADI SISTEM JARINGAN YANG AKAN UYILITAS INI AKAN KITA BANGUN BERSAMA PAK SUPAYA TIDAK ADA LAGI YANG SEMRAUT DI KOTA PALU INI DARI PEMBANGUNAN YANG DI LAKSANAKAN DEVELOPER ATAU CALL INVESTOR ATAU KAH VENDOR-VENDOR SEMUA AKAN NANTI KITA AKAN COBA UNTUK DUDUK BERSAMA DAN SEMUA DALAM REGULASI INI AKAN KITA COBA TANGANI MUNGKIN ITU DARI IBU YANG TERHORMAT IBU RUSTIA BERKENAN DENGAN REGULASI INI SEBENARNYA REGULASI INI DI BUAT DULU MOHON MAAF YANG TERHORMAT IBU RUSTIA DI BUAT DULU BUKAN,KITA KOMUNIKASI KAN JADI DASAR BAHWA REGULASI INI ADALAH APA YANG AKAN DI LAKUKAN KALAU MEMANG TERJADI INVESTASI YANG TADINYA MELIBATKAN PIHAK SWASTA MAKA NANTI INI TIDAK MELIHAT SWASTA NYA DULU TAPI MELIHAT REGULASI NYA DULU MAKANYA PENGATURAN KITA BERKENAN DENGAN UTILITAS INI YANG MENJADI DASAR YANG MENJADI ACUAN MENJADI PANDUAN KALAU MEMANG DIA MELAKSANAKAN AKTIVITAS PEMBANGUNAN JARINGAN DI PEMERINTAH KOTA PALU MAKANYA KALAU INI MENJADI REGULASI DIA HARUS MENCOCOKAN DENGAN REGULASI

YANG SUDAH TERSUSUN OLEH PEMERINTAH KOTA PALU KARENA REGULASI INI BUK MOHON MAAF YANG TERHORMAT IBU RUSTIA BUKAN HAL TAWAR MENAWAR INI ADALAH SISTEMATIKA PENGATURAN UNTUK KEDEPANNYA ORANG MELAKUKAN AKTIFITAS ATAU MELAKUKAN SISTEMATIKA JARINGAN YANG ADA DI PEMERINTAH KOTA PALU JADI INI BERLAKU SECARA UMUM BUKAN DIA BERLAKU SECARA SPESIFIK MAKA REGULASI INI SEBENARNYA DI BUAT UNTUK MENGATUR SECARA UMUM JADI SIAPAPUN YANG INGUIN MELAKUKAN INVESTASI ATAU MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALU REGULASI NYA SUDAH MENJADI DASAR PELAKSANAAN YANG HARUS MUNGKIN MENJADI CATATAN MAKANYA HAL-HAL INI YANG MUNGKIN GAMBARAN DI DALAM MATERI DI DALAM BATANG TUBUH PERDA INI DI SUSUN LEBIH MENGGAMBARAKAN BUKAN MEMBERIKAN RUANG KEPADA SESEORANG TETAPI MENGATUR SECARA UMUM APA YANG HARUS ORANG LAKUKAN BILA MANA BERINVESTASI KALAU DALAM JARINGAN UTILITAS INI MUNGKIN ITU GAMBARAN DARI KAMI. TERIMA KASIH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

KALAU SO SELESAI DI ATAS PINDAH DI ATAS LAGI KITA INI OKE MUNGKIN BISA KITA LANJUT KEK BAB BERIKUT TOLONG DI BACA

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN BAB 3 SARANA DAN PRASARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU PASAL 10 SAMPAI BAB 4 PENEMPATAN, PEMELIHARAAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

OKE DI BAB 3 ADA YANG MAU DI SANGGAH? PAK ANDRIS?

**ANDRIS, S.Sos (ANGGOTA PANSUS)**

BACA SEMUA SAJA DULU

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

OKE KITA LANJUT

***SEKERTARIAT MEMBACAKAN BAB 4 SAMPAI PASAL 21***

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IYA JADI KALAU MEMANG KITA MAU BAHAS SAYA JUGA ADA BEBERAPA PERTANYAAN MEMANG INI HANYA SAJA TADI KAN DI BILANG UNTUK DI BACA SAJA DULU KALAU MEMANG ADA YANG MAU DI BAHAS AYO KITA BAHAS ADA PASAL-PASAL YANG MAU DI BAHAS ADA YANG MAU DI SAMPAIKAN ?

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH PIMPINAN JADI SAYA LANGSUNG SAJA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENILAIAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN SEBAGAI MANA DI MAKSUD PADA AYAT ( 1) PASAL 13 AYAT (2) DI BEBAN KAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAH DAERAH NAH INI PENILAIAN TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN INI KONSULTAN ATAU APA INI KARENA INI PENILAINNYA BERATI INDENPENDEN APAKAH EMMANG MEMERLUKAN ATAU DINAS TERKAIT SAJA YANG MELAKUKAN PENILAIAN TERSEBUT NAH ITU YANG PERTAMA TERUS TERKAIT DENGAN JARINGAN UTILITAS DI BAWAH TANAH NAH

INI PASAL 16 AYAT 2 APABILA JARINGAN UTILITAS DI TEMPATKAN DI BAWAH TANAH HARUS DI LETAKAN PADA KEDALAMAN MINIMAL 1,5 METER DARI PERMUKAAN JALAN TERENDAH PADA DAERAH GALIAN ATAU DARI TANAH DASAR PADA DAERAH TIMBUNAN NAH DI PAS DI AYAT (4) PASAL 16 DI KECUALIKAN DARI KETENTUAN AYAT (2) UNTUK PEMASANGAN JARINGAN UTILITAS DISTIBUSI AIR MINUM NAH MAKSUDNYA INI DISTIBUSI AIR MINUM BAGAIMANA YANG DI KECUALIKAN APAKAH PDAM BERARTI DIA HARUS DI LUAR DARI PEMASANGAN JARINGAN INI JARINGAN UTILITAS BERARTI DI MUNCUL ATAU BAGAIMANA NAH SELANJUTNYA PASAL 19 EH MUNGKIN ITU SAJA DULU PASAL 16 DENGAN PASAL 13 AYAT (2) YA TERIMA KASIH PIMPINAN.

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

YA MUNGKIN BISA LANGSUNG PAK KABAG

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

YA BAIK TERIMA KASIH YANG TERHORMAT PAK IMAM BERKENAN DENGAN PASAL 13 AYAT (2) TENTANG BIAYA PELAKSANAAN PENILAIAN PENEMPATAN BAGIAN DIJALAN MASUK AYAT (1) DI BEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MEMANG INI BERKENAN DENGAN INI PERHITUNGAN APRESIAL SEBENARNYA INI PAK PERHITUNGAN APRESIAL ADALAH PUBLIK YANG NANTINYA KALAU PELAKSANAAN BERKENAN DENGAN BERAPA SIH PERHITUNGAN MEMANG DALAM REGULASI INI PERHITUNGAN-PERHITUNGAN BERKENAN DENGAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN ATAU SARANA-SARANA RUMIJA ITU MEMANG HITUNGANNYA DI HITUNG BERDASARKAN NILAI APRESIAL PAK PENILAIAN APRESIAL INI YANG SEBENARNYA PEMBEBANANNYA BANYAKNYA ITU YANG NANTINYA MENJADI DASAR BAHWA BERAPA NILAI KALAU KITA MEMASUKAN DALAM NILAI SEWA ATAU PEMAKAIAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH MAKANYA ITU YANG DI HITUNG ADALAH NILAI JASA YANG DI BERIKAN KEPADA PENILAI PUBLIK MEMANG INI TIDAK BISA DI HINDARKAN KARENA DALAM SISTEM PPNILAIAN APRESIAL INI MEMANG HARUS PEMBEBANANNYA KE APBD TIDAK BISA DI BEBANKAN KEPADA SWASTA MEMANG TAPI NILAI INI NANTINYA MENJADI DASAR BAHWA BESARAN INI MASUK DALAM RETRIBUSI DAN TARIF KALAU MEMANG MEJA ITU DI GUNAKAN UNTUK APA DALAM APA YA UNDANG-UNDANG 1 2023 UNDANG UNDANG HAK APD TENTANG AKPD EH 2020 TENTANG AKPD DI PERDA NOMOR 9 MAKA PARA RETRIBUSI INI YANG HARUS MENGHITUNG PAK YANG HARUS MEMANG PENILAI PUBLIK MAKANYA PENILAI PUBLIK ITU JASANYA HARUS DI BAYAR NAH KALAU KITA MAU MEMASUKKAN NYA DALAM RETRIBUSI ATAU TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH JADI JASA DARI APRESIAL INI YANG DI MASUKKAN PERHITUNGANNYA PAK SELAMA KITA MEMANG KITA SUDAH PUNYA PERHITUNGAN TERHADAP BERAPA PEMANFAATAN DARI RUANG MILIK JALAN ATAU DAERAH MILIK JALAN INI TIDAK PERLU DI PEMBEBANA LAGI KALAU KITA SUDAH MENDAPATKAN NILAI PERHITUNGANNYA TAPI KALAU BELUM MEMANG HARUS DI HITUNG DENGAN MENGGUNAKAN APRESIAL PAK KARENA TIDAK BISA PEMERINTAH MENGHITUNG KAN NILAI RETRIBUSI ATAU SEWA TERHADAP BARANG MILIK DAERAH SEMUA HARUS DI TENTUKAN DENGAN NILAI APRESIAL OH IYA SAYA ADZAN IYA MUNGKIN ITU PENJELASAN SILAHKAN

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

PEMANFAATAN SESUAI PENJELASAN PAK KABAG INI KAN DI NILAI DARI TIM APRESIAL TENTANG NILAI RETRIBUSI YA RETRIBUSI NAH SEDANGKAN KITA INI

APA NAMANYA PEMBUATAN JARINGAN UTILITAS INI KAN KE DEPANNYA TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA DARI APBD NAH SEHARUSNYA KALAU MAU MANYANGKUT NILAI RETRIBUSI TERSEBUT NAH ITU NANTI DI SERAHKAN KE PIHAK KE 3 KARENA KITA TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA DARI APBD NAH KITA FOKUSNYA NANTI KE DEPAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS INI DI LAKSANAKAN OLEH PIHAK KE 3 NAH KALAU KITA LAKSANAKAN BIAYA PELAKSANA PEMANFAATAN BAGIAN JALAN INI DI BEBANKAN PADA APBD NAH BERARTI YANG SELANJUTNYA MUNGKIN PADA PASAL SELANJUTNYA ADA UNTUK PEMBANGUNANNYA YA HARUS DARI KITA JUGA NAH BEDA DIA KALAU DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA NAH CONTOH KITA KAN HABIS KUNJUNGAN KEMARIN KE DKI JAKARTA NAH KALAU DI DKI JAKARTA ITU DIA PUNYA TARIF DI TENTUKAN OLEH PIHAK KE TIGA ATAU 01.40.04 NAH KALAU KITA TENTUKAN LEWAT TIM APRESIAL TERUS MUNGKIN KE DEPAN PIHAK KE 3 YANG MELAKSANAKAN TETAPI NILAINYA BERBEDA TIDAK SESUAI HARAPAN DARI PIHAK KE TIGA KASIAN NANTI PIHAK KE TIGA YANG MEMBANGUN JARINGAN UTILITAS INI, INI MAKSUDNYA SARAN TERIMA KASIH PIMPINAN

**RATNA MAYASARI AGAN, SE (WAKIL KETUA PANSUS)**

IYA BAIK ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI PIMPINAN PANSUS DAN ANGGOTA PANSUS YANG SAYA HORMATI DARI DINAS PU SELAKU LEADING SECTOR DARI PERDA INI KABAG HUKUM SEBENTAR DARI PTSP IBU DARI MANA YANG SEBELAHNYA OHH KOMINFO SORRY KOMINFO DAN PAK PROF SELAKU TENAGA AHLI DPRD BAIK MOHON MAAF SEDIKIT TERLAMBAT KARENA MEMANG BERTEPATAN DENGAN RAPIN BERSAMA KAPOLRES TADI DI ATAS YANG PERTAMA SAYA DI PASAL 13 MUNGKIN SEPERTI YANG DI SAMPAIKAN YANG TERHORMAT PAK IMAM KARENA MEMANG SETELAH KITA MELAKUKAN KUNJUNGAN KEDUA TEMPAT TERNYATA MEMANG PADA SAAT PELAKSANAAN UNTUK SISTEM JARINGAN UTILITAS INI SAMA SEKALI TIDAK MENGGUNAKAN APBD NAH INILAH YANG COBA KITA ADOPSI KENAPA HARI INI KITA HARUS MELIHAT KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALU NAH APALAGI TADI KITA JUGA TELAH MEMBAHAS BAGAIMANA DI RAPIN TADI KITA MEMBAHAS BAGAIMANA MASYARAKAT KOTA PALU INI MEMANG WAJIB MENDAPATKAN PELAYANAN YANG MAKSIMAL SALAH SATUNYA DI DALAMNYA ADALAH KEAMANAN DAN KENYAMANAN TENTUNYA JUGA PERLU BUDGETING MAKANYA YANG KITA PIKIRKAN ADALAH BAGAIMANA KITA MENGEDEPANKAN PROGRAM-PROGRAM YANG LANGSUNG BERSENTUHAN DENGAN MASYARAKAT ITU DULU YANG KITA PRIORITASKAN UNTUK ITU SAYA SEPAKAT BESERTA BEBERAPA TEMAN YANG ADA DI PANSUS INI UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN APBD TAPI MARILAH KITA LEBIH BERKREATIF BERINOVASI BAGAIMANA CARANYA INVESTOR ITU BISA MASUK KE KOTA PALU UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM INI NAH DI PASAL 13 AYAT 2 INI ADA BIAYA KONSEN PENILAIAN PEMANFAATAN TADI SUDAH DI JELASKAN OLEH PAK KABAG HUKUM BAHWA YANG B INI ADALAH BIAYA APRESIAL UNTUK TIM YANG TURUN UNTUK MENILAI NAH SEBENARNYA DARI AWAL YANG KAMI INGIN KAN ADALAH PERENCANAAN JARINGAN UTILITAS INI KAN SAMPAI SEKARANG BELUM ADA KETIKA DARI AWAL KITA RAPAT KAMI MEMINTA APAKAH SUDAH ADA PERENCANAANNYA APAKAH ADA SEPERTI APA NAMANYA HITUNGAN-HITUNGAN NYA ITU TERNYATA SAMPAI SEKARANG BELUM ADA NAH KETIKA ITU SUDAH ADA SAYA PIKIR KAN TIDAK PERLU LAGI ADA PEMBIAYAAN LAGI APRESIAL NAH APRESIAL INI MELEKAT DI DINAS MANA NANTINYA TOLONG DI JAWAB TERUS

YANG KEDUA BAHWA SAYA MELIHAT DISINI PADA PASAL 15 ITU PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS INI ADA DI BAWAH TANAH DAN ADA DI ATAS TANAH APAKAH INI SUDAH DI PASTIKAN MELIHAT KONDISI KOTA PALU SEKARANG UNTUK ITU SEBENARNYA PERLU PERENCANAAN DARI AWAL KITA MINTA DOKUMEN PERENCANAAN NYA KETIKA KITA MENEMPATKAN MENETAPKAN DI PASAL 15 INI MISALNYA JARINGAN DI BAWAH TANAH APAKAH ITU SUDAH SESUAI DENGAN KONDISI TANAH KOTA PALU DENGAN KEADAAN KOTA PALU YANG SEKARANG YANG LAGI SEMRAWUT JUGA DENGAN GALIAN-GALIAN DRAINASE DENGAN SEBAGAINYA APAKAH INI SUDAH ADA TELAHAH NYA TAPI KAN BELUM ADA NAH UNTUK MENETAPKAN INI PIMPINAN PANSUS INI HARUS KITA LIHAT JUGA DENGAN KONDISI APAKAH PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS INI BISA DI BAWA TANAH ATAU HANYA DI ATAS TANAH KITA MERAPIKAN TIANG-TIANG MISALNYA YANG TADI NYA BANYAK TIANG MUNGKIN TIBA-TIBA CUMA SATU DUA TIANG MISALNYA SEPERTI ITU NAH KAJIANNYA INI YANG KAMI BUTUHKAN SEBENARNYA DARI PANSUS DARI AWAL TETAPI PENGHITUNGAN NYA ITU KAN BELUM KELIATAN NAH UNTUK ITU SAYA SELAKU ANGGOTA PANSUS MINTA PENJELASANNYA MEMANG SEBENARNYA DOKUMEN DOKUMEN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN JARINGAN UTILITAS INI YANG SANGAT PENTING SEBENARNYA TERMASUK HITUNG-HITUNGANNYA SEBENARNYA KALAU KITA BACA DI NASKAH AKADEMIK ITU KAN SUDAH ADA BEBERAPA PILIHAN JALAN-JALAN ATERI KOTA PALU INI DI MANA DIMANA SAJA KAN SEBENARNYA SUDAH ADA HITUNG-HITUNGANNYA HARUSNYA DI APA DI LAMPIRKAN DENGAN HITUNG-HITUNGAN MISALNYA PERENCANAAN NYA NANTI PANJANGNYA SEKIAN SEKITAR INI INI SEPERTI INI NAH ITU YANG KITA INGINKAN SEBENARNYA NASKAH PERENCANAAN NYA INI UNTUK JARINGAN UTILITAS INI KALAU NASKAH AKADEMIK ADA TAPI SECARA TEKNIS TIDAK TERMUAT SMEUA DIDALAMNYA SAYA SUDAH MEMBACA NASKHA AKADEMIK NYA NAH MUNGKIN INI MENJADI PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN KITA PIMPINAN KALAU MEMANG MAU DI LANJUTKAN SAYA BERHARAP BAHWA SEPERTI DAERAH LAIN PROGRAM INI TIDAK MENGGUNAKAN DANA APBD TIDAK MENGELUARKAN DANA APBD APAPUN ITU TERIMA KASIH PIMPINAN

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**  
BAIK PAK KABAG

**ABDURRAHIM NASAR AL'AMRI, SE (ANGGOTA PANSUS)**

TERIMA KASIH PIMPINAN SAYA LANGSUNG AJA PAK KABAG MUNGKIN LANGSUNG INI PAK DI TADI YANG SI SAMPAIKAN OLEH IBU RATNA JUGA DENGAN PAK IMAM DARMAWAN YANG TERHORMAT SEBENANRYA GINI PAK KABAG KAN KITA SAMA-SAMA SUDAH PERGI BERSAMA INI DAN KITA SUDAH TAHU SOLUSI NYA BAHWA DI APA PROVINSI LAIN TIDAK MENGGUNAKAN APBD ITU DULU PERTAMA KITA TANGKAPNYA DULU APALAGI DI DAERAH KITA YANG DKI SAJA YANG DIA PUNYA MUNGKIN DIA PUNYA PAD ATAUPUN APBD YANG LUAR BIASA MEREKA TIDAK MELAKUKAN PAKE APBD KITA TAPI KALAU MEMANG DI SINI TIDAK USAH KITA MUNGKIN BERPANJANG LEBAR MENGENAI DI PASAL 13 TADI INI KAN SUDAH ADA DI TULIS DI SINI PAK BIAYA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAGI JALAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD PADA AYAT 1 DI BEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH NAH INI SUDAH MASUK BERARTI DI DALAM RUMUS INI YANG SAYA MAU MINTA DENGAN PAK KABAG MISALNYA DARI BAGIAN HUKUM APAKAH KALAU KITA MENGHILANGKAN ITU APAKAH BOLEH APA TIDAK

ITU DULU YANG MAU SAYA TANYAKAN KENAPA KARENA KALAU KITA MENGHILANGKAN ITU BERARTI MEMANG KITA HARUS FOKUS KEPADA INVESTOR ATAU PIHAK KE TIGA KARENA KALAU DI DALAM SINI MASIH ADA DAN INI DI SAHKAN MISALNYA PERDANYA BERARTI KITA BISA MENGGUNAKAN APBD MOHON MAAF APA YANG SAYA SAMPAIKAN TADI SAMA DENGAN KASUS BIS, BIS ITU PAK WAKTU PERTAMA DI KELUARKAN DI BAHAS DENGAN BANGGAR BAHWA CUMA MENYIAPKAN HALTE MENYIAPKAN DIA PUNYA SUMBER, SUMBERNYA DIA UNTUK DATANYA TAPI TIDAK ADA PEMBIAYAAN MEMBIAYAI APBD TAPI HARI INI KITA SUDAH HARUS MENYIAPKAN DUA PULUH SATU MILYAR PERTAHUN PERBULANNYA 1,6 M YANG HARI INI BIS INI TIDAK TAHU APA GUNANYA KITA TIDAK MAU HILANGKAN BIS TAPI KITA DI SINI MAU IKUT TREN IBARATNYA PENTING TRANSPORTASI UNTUK DAERAH TAPI KITA LIHAT MANFAATNYA KEPADA MASYARAKAT APA NAH INI YANG TADI SAYA BILANG TERUTAMA IBU RATNA BILANG ADA NAMANYA TIANG TERPADU SATU TIANG ITU, ITU DULU YANG KITA FOKUSKAN MENURUT SAYA PAK YANG KITA FOKUS KAN ADALAH BAGAIMANA INI OSS KITA BISA LAWAN BAGAIMANA HASIL MELAWAN OSS INI KARENA KITA MAU MENGEJAR PAD DARI SINI KALAU MEMANG OSS DATANG XL DATANG SEENAK MEREKA KITA RIBUT PAK SAYA INGAT DI PERIODE AWAL SAYA DISINI PAK KAMI RIBUT DENGAN INI PIHAK XL SEENAK MEREKA TIDAK ADA JAWABANNYA MEREKA DORANG BILANG KAMI ADA SURAT DARI PUSAT JADI MEREKA MAU PASANG DI RUMAH SIAPAPUN ITU TIANG HAKNYA MEREKA TIDAK ADA LARANGAN OLEH PEMERINTAH PADAHAL MASYARAKAT SUDAH MENGELUH KEPADA KITA PAK DI DEPAN RUMAH SAYA PAK TIANGNYA DI ININYA SAYA PAK INI YANG TADI SAYA CUMA MAU GAMBARAKAN BAHWA SAYA SETUJU PAK ULANG-ULANG SAYA BILANG SAYA ABDURAHIM SANGAT SETUJU DENGAN INI UTILITAS TAPI KITA PIKIRKAN BAIK-BAIK KAJI BAIK-BAIK KARENA APA HAMPIR SEMUA KOTA BESAR YANG KITA PERGIKAN SAJA IBU KOTA DKI AJA TIDAK MEMAKAI APBD TANGERANG SELATAN TIDAK MEMAKAI APBD JADI INI YANG MUNGKIN GAMBARAN DARI SAYA PAK KETUA KALAU ADA YANG TADI SAMPAI KITA BILANG DARI AWAL INSYA ALLAH IBU RUSTIA TOMPO SUDAH BERUSAHA NAH INI YANG KITA PIKIRKAN MUDAH-MUDAHAN DATANG KITA TUKAR PIKIRAN DENGAN MEREKA PIHAK KE TIGA SIAP NDA KAMU BANGUN INI DI KOTA PALU ATAU HARUS SISTEM SATU SAJA SATU TIANG TERPADU SATU TIANG AJA UNTUK SEMUA MUNGKIN ITU SAJA PAK KETUA KALAU SAYA SARAN DI PASAL 13 ITU APAKAH BOLEH SAYA MENANYA DI SINI JUGA ADA TIM HUKUM KALAU BOLEH DI HILANGKAN SARAN SAYA DI HILANGKAN SUPAYA TIDAK KITA TER APA YA TERJERAT DENGAN PASAL 13 ITU YAITU MENGGUNAKAN PAKAI APBD ITU SAJA MUNGKIN PIMPINAN TERIMA KASIH BANYAK

#### **H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IYA PAK KABAG HUKUM YA SAYA JUGA INI PAS BACA INI KAGET JUGA KENAPA LAGI INI KENAPA ADA INI JADI MUNGKIN KITA BUTUH PENJELASAN LEBIH LANJUT KITA MUNGKIN SELESAIKAN MEMBAHAS DI BAB EH DI BAB INI BAB APA BAB 3 YA TADI BARU BAB TIGA KITA KAN DI PASAL BARU SAMPAI DI PASAL SEBELUM MASUK BAB 4 INI KITA SELESAIKAN DULU PENJELASAN-PENJELASAN INI KARENA DARI SAYA SENDIRI JUGA INI PAK KABAG SAYA INI KAN BINGUNG JUGA MASALAH JALAN KOTA MANA YANG JALAN KOTA MANA YANG ASET KOTA MANA YANG ASET PROVINSI SEMENTARA KITA DI KOTA INI HARUSNYA KETIKA JALAN-JALAN YANG BERADA DI DALAM KOTA MAKSUDNYA DI SINI SEPERTI MUHAMMAD YAMIN ITU MUHAMMAD YAMIN ITU KAN MASUK DALAM JALAN

PROVINSI TERUS GAJAH MADA MAKSUD SAYA DI SINI PAK KABAG BISA TIDAK SUPAYA KITA INI JANGAN SAMPAI KITA MEMPERBAIKI DI SANA ITU MENJADI ASET DARI PROVINSI KITA MEMPERBAIKI DI SINI JADI ASET PROVINSI SEMENTARA PEMBEBANAN BIAYA KEBERSIHAN ITU KITA BERSIHKAN JALAN ITU KAN MENGGUNAKAN EH APBD KITA PAK APBD KOTA BUKAN APBD PROVINSI BEGITU JADI INI MEMANG HARUS DI PERTEGAS JADI MUNGKIN DARI SELANG WAKTU INI PAK INI HARUS DI PERTEGAS NANTI UTILITAS INI MEMANG BETUL-BETUL MASUK DI DALAM ASET KOTA BEGITU JANGAN SAMPAI MASUK DIA ASET PROVINSI BEGITU MUNGKIN ITU MOHON PENJELASAN PAK KABAG TERIMA KASIH

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

IYA TERIMA KASIH KETUA PANSUS DAN SEMUA ANGGOTA PANSUS YANG SAYA HORMATI YANG PERTAMA MUNGKIN IZIN PAK PROF INI SUDAH DISKUSI PANJANG LEBAR INI DARI PAGI INI PAK CALI SUDAH HADIR JUGA YANG PERTAMA YANG TERHORMAT PERTANYAAN DARI YANG TERHORMAT PAK IBU NENI AGAN BERKENAN DENGAN PERENCANAAN MUNGKIN KITA SUDAH BAHAS TADI MEMANG SAYA SUDHA MUNGKIN MENGULANG KEMBALI MEREVIEW KEMBALI BAHWA MEMANG DI DALAM DRAFT PERDA INI KITA SUDAH MEMBICARAKAN PERENCANAAN, PERENCANAAN ITU TADINYA MELIBATKAN SEMUA BEBERAPA OPD DAN JUGA MELIBATKAN INSTANSI-INSTANSI DI LUAR OPD DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG NANTINYA BERGERAK SAMA-SAMA MEMBUAT PERENCANAAN MENYAMPAIKAN KE DINAS PEKERJAAN UMNUM TADI SIH KITA SUDAH MAKANYA DALAM REGULASI INI BERKENAN DNEGAN HAL-HAL YANG AKAN DI LAKUKAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALU INI PIHAK-PIHAK SWASTA ATAU PIHAK-PIHAK PENGEMBANG SUDAH MENYAMPAIKAN DI MANA DI AKOMODIR DI PASAL EH SAYA LUPA DI PASAL 6 YA DARI PASAL 6 SUDAH MENGAKOMODIR TADI PASAL IYA DI PASAL 5 6 7 SAMPAI DENGAN PASAL 9 IYA PASAL 9 NAH ITU MENGAKOMODIR BAGAIMANA SESEORANG PIHAK SWASTA ATAU PARA PENGEMBANG YANG AKAN MELAKSANAKAN AKTIVITAS ITU ITU SUDAH TERKONEKSITAS ARTINYA TERHUBUNG SATU SAMA LAIN MAKANYA DALAM HAL INI MEREKA SUDAH MENYAMPAIKAN DI PASAL TADI YANG KITA MUNGKIN YANG TERHORMAT ADA ANU DI PASAL 9 SUDAH MENJELASKAN PANJANG LEBAR BAGAIMANA SUATU INSTANSI ATAU RENCANA ITU SUDAH MENYAMPAIKAN DAN ITU NANTINYA AKAN DI BAHAS DI BAHAS BERSAMA DAN NANTINYA PRODUK YANG DI KELUARKAN ADA MASTER PLAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS SELAMA 5 TAHUN KE DEPAN PENYAMPENYA AKAN DI SAMPAIKAN SEBELUM AKHIR BULAN DESEMBER DAN ITU MENJADI CATATAN NANTINYA AKTIVITAS-AKTIVITAS SWASTA AKTIVITAS EH YANG AKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU ITU SUDAH TERPROGRAM TERSTRUKTUR DALAM MASTER PLANMAKANYA MASTER PLAN NANTI ITU BUKAN DI SUSUN DI AWAL TETAPI DI SUSUN PADA SAAT REGULASI INI SELESAI BARU NANTI DI BUAT KAN SKNYA DAN DI SUSUN BERSAMA-SAMA UNTUK 5 TAHUN PERENCANAAN KE DEPAN JADI KE DEPAN 5 TAHUN NAH MAKANYA INI DI SITULAH NANTI NYA SEMUA VENDOR-VENDOR YANG MAU MELAKSANAKAN PELAKSANAAN KAYA XL TELKOM JARINGAN-JARINGAN APA YANG ADA YANG MUNGKIN YANG MEREKA SUDAH MENYAMPAIKAN MENYAMPAIKAN PROGRAM MEREKA 5 TAHUN KE DEPAN SAYA MAU BIKIN INI DI PEMERINTAH KOTA PALU MAKA DENGAN INSTANSI TEKNIS TADI YANG ADA INI SUDAH MAU MENDESAIN MASTER PLANNYA MAKANYA INI MENCAKUP TADI PERENCANAAN YANG NANTINYA AKAN MENJADI SATU MASTER PLAN KE DEPANNYA UNTUK MENJADI ACUAN

DALAM PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN UTILITAS NAH ITU YANG NANTINYA BERKENAAN DENGAN INI MASALAH PEMBIAYAAN JUGA TADI KITA SUDAH DISKUSI PANJANG LEBAR MAKA DALAM PEMBIAYAAN DI PASAL SAYA LUPA PASAL 20 EH 48 YA PEMELIHARAAN ADA JAMINAN SAYA LUPA SUDAH TADI INI PASAL 42 NAH PASAL 42 INI NANTINYA INI KAN BELUM SAMPAI DI DALAM PEMBAHASAN KITA MEMANG SARAN KEMARIN ITU MENGGUNAKAN DALAM KONSEP APBN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YANG SAH YANG TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUA PERUNDANG-UNDANGAN KENAPA DI SEBUTKAN DI APBN TADI KARENA DI APBN INI ADA SUMBER YANG BISA MENDUKUNG KEGIATAN JARINGAN UTILITAS BPJN ITU AKAN MEMBANGUN SARANA UTILITAS YANG DI DUKUNG UNTUK DI JALAN PROFESOR MUHAMAD YAMIN ITU DARI BPJN MAKANYA KITA LAGI MEMBEBAKANN KE APBD KAMI AKAN MEMBEBAKANN DUKUNGAN PELAKSANAAN INI DARI APBN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAIN SWASTANISASI DAN LAIN-LAINNYA MAKANYA DI DALAM NANTI MASUK INI MUNGKIN KITA AKAN LAKUKAN PERBAIKAN BERKENAN DENGAN INI BERKENAN DENGAN PASAL 13 KENAPA ITU,ITU MENYANGKUT HAL-HAL YANG HITUNG KALAU MEMANG KITA AKAN MENGGUNAKAN RETRIBUSI ATAU SEWA DARI BARANG MILIK DAERAH RETRIBUSI BARANG MILIK DAERAH SESUAI REGULASI KETENTUAN HARUS DI HITUNG MENGGUNAKAN APRESIAL APRESIAL JASA INI TIDAK MUNGKIN KITA AKAN BEBANKAN KEPADA PIHAK SWASTA AH ITU YANG MAKANYA NILAI YANG NANTI NYA YANG NANTI AKAN DI MASUKAN KE SALAH SATU KALAU MISALNYA ADA RUANG MILIK JALAN YANG INGIN DI GUNAKAN OLEH SWASTA ITU PEMERINTAH TIDAK BISA MENGHITUNG MENAKSIR TETAPI TAFSIRAN HARGA NILAI DARI BERAPA SEWA TANAH NEGARA YANG ITU HARUS DI HITUNG BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG DI KELUARKAN OLEH APRESIAL MENJADI ACUAN YANG DI TETAPKAN NANTINYA DALAM REGULASI PERUBAHAN DI DALAM PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PERDA NO 9 2022 ITU DISITU AKAN KITA RUBAH KARENA MEMANG DALAM SEWA RUMIJA DAERAH MILIK JALAN ITU BELUM PERNAH ADA DALAM PERDA KITA MAKANYA ITU YANG KITA MASUKAN NILAI JASA YANG DI MAKSUD DI APBD INI ADALAH HANYA ITU NILAI YANG APRESIAL ITU DENGAN PEMBIAYAAN NANTINYA DI BEBANKAN UNTUK APBD KARENA DIA MASUK KE MENJADI TARIF YANG HARUS DI STOR KE KAS DAERAH MAKANYA ITU SAJA PEMBIAYAAN KALAU SARANA PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN UTILITAS ITU TIDAK ADA MAKANYA ITU MEMANG JARINGAN PENYELA PEMBANGUNAN ITU FULL TADI DI BEBANKAN KEPADA APBN DAN DI BEBANKAN KEPADA SUMBER PEMBIAYAAN YANG LAINNYA YANG SAH TIDAK DI KEMBALI LAGI KITA MEMBIAYAI DENGAN APBD ARTINYA SUPAYA NANTI APBDNYA KITA SESUAI HARAPAN ITU TIDAK TERBEBANI YA ITU YANG STRATEGI ARTINYA TADI SAMPAI DENGAN KITA MEMBICARAKAN HAL-HAL YANG SIFATNYA NANTINYA MUNGKIN BAGAIMANA KALAU ITU YANG APBD ITU HANYA PEMBAYARAN UNTUK APRESIAL SAJA UNTUK TIDAK ADA LAGI APBD YANG AKAN DI BEBANKAN KALAU NANTI DALAM PERHITUNGAN SUDAH ADA ITU TIDAK MENJADI DASAR LAGI PERMBAYARAN PERHITUNGAN KARENA NILAI ITU KITA MASUKAN KALAU MEMANG KALAU KITA INGIN MENGGUNAKAN TENAGA APRESIAL MAKA HARUS DI BIAYAI OLEH APBD KITA RENCANA INI NANTI DIMANA MENEMPELNYA NANTI MUNGKIN SAJA DI DINAS BPKD SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN BERKENAN DENGAN ASET DAERAH KARENA INI MENYANGKUT TADI ITU PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN YANG ADA JARINGAN SATU YANG AKAN DI TARO DI IYA INI TIDAK BOLEH BAKU ISI INI,INI BERAT KALAU BAKU ISI INI JADI ITU MUNGKIN SAJA YA MUNGKIN TEKNIS NYA INI NANTI MUNGKIN ADA PAK PROF BISA MENAMBAHKANN

HAL-HAL YANG INI YANG ADA JUGA PAK CALIK JADI INILAH YANG DI MAKSU DALAM REGULASI DRAFT RANCANGAN PENYELENGGARAAN INI APBD ITU HANYA MENGHITUNG ITU TADI KARENA DISITU MENYANGKUT RETRIBUSI DAN SEWA TANAH EH SEWA BARANG MILIK NEGARA MAKANYA KALAU ITU HARUS DIHITUNG DENGAN APRESIAL TIDAK BOLEH KITA MENAFSIR-NAFSIRKAN KARENA ITU NANTI PAKAI JASA PENILAI PUBLIK ITU YANG,KALAU PUN NANTI BISA DI MAUSKAN DENGAN YANG APRESIAL INDPENPENDEN YANG TIM PENILAI PUBLIK YA ITU KARENA KAMI HANYA MEMASUKAN KALAU SUATU SAAT ADA HITUNGAN-HITUNGAN ITU MAKA APRESIAL YANG AKAN MENJADI,APRESIAL ITU DI BEBANKAN KEPADA APBD TAPI KALAU UNTUK PEMBANGUNAN INI HANYA DUA TADI PEMBIAYAAN INI KARENA KITA BELUM MASUK SAMPAI PASAL INI SOALNYA MASIH JAUH INI TAPI GAMBARAN TADI KAMI SUDAH MENANGGAP BAHWA PEMBANGUNAN INI JANGAN MENGGUNAKAN APBD SEHINGGA APBD TIDAK TERBEBANI ITU YANG SAMA-SAMA NANTI MASUK DI PASAL INI BARU KITA BAHAS MUNGKIN PAK CALI ADA TAMBAHKAN SILAHKAN

**GHAZALY (BAGIAN HUKUM)**

MOHON IJIN PIMPINAN

**MOH. IMAM DARMAWAN (ANGGOTA PANSUS)**

JADI SAYA MENYAMBUNG SEDIKIT DARI PAK KABAG NAH INI KAN KEDEPAN PEMBANGUNAN INI UTILITAS TERPADU INI BESAR KEMUNGKINAN AKAN DI LAKSANAKAN OLEH PIHAK KE TIGA BAGAIMANA KITA MISALNYA NIH KITA MENUNJUK TIM APRISAL TAPI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INI KAN BESAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BESAR KALAU MEMANG DI PIHAK KETIGA KAN NAH KITA TIDAK TAU LAGI BAGAIMANA HITUNGAN DARI PIHAK KETIGA TERSEBUT WALAUPUN NIH MUNGKIN NANTI AKAN ADA EMO U KERJA SAMA ANTARA PIHAK KETIGA DAN PEMDA TERKAIT DENGAN PEMAKAIAN JALAN TERSEBUT PEMAKAIAN JARINGAN UTILITAS NAH ITU KAN HARUS DI TAU JUGA JANGAN SAMPAI BEGITU KITA LAKSANAKAN INI TIM PENILAI DARI TIM APRISAL TADI BEGITU DI KELUARKAN NILAINYA TARI RETRIBUSI ATAU TARIK SEWANYA DI TAWARKAN KE PIHAK KETIGA ITU TIDAK SESUI DENGAN PENGELUARAN YANG DI KELUARKAN OLEH PIHAK KETIGA NAH INI KAN KITA HARUS PIKIRKAN JUGA BUKAN SEMATA-SEMATA MAKSUDNYA SAYA INI TIDAK INI INI SUDAH BAGUS MEMANG APAKAH BOLEH TETAP DI TUNJUK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL INI WALIKOTA PALU TETAPI PEMBIAYAANNYA DI LAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG AKAN EMO U DENGAN PEMDA TERUS BAGAIMANA NANTI APABILA MISALNYA INI KALAU SUDAH DI KELUARKAN TIM APRISAL SUDAH ADA NILAI-NILAI TARIF DENGAN SEWA TERSEBUT TAPI BEGITU DI TAWARKAN NAH PIHAK KETIGA TADI KURANG RESPON NAH KALAU KITA SUDAH MELAKSANAKAN SEMUA TAPI TIDAK ADA YANG KERJA INI KARENA TARIF SEWA TADI DAN RETRIBUSI MUNGKIN DORANG RASA DENGAN PENGELURAN YANG DI KELUARKAN PIHAK KE 3 DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS TERSEBUT NAH MUNGKIN DARI SAYA UTU PIMPINAN

**MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

SEBELUM PAK CALI JUGA MELANJUTKAN JAWABANNYA SEBNARNYA KITA SUDAH TADI MEMBACA PASAL 11 PASAL 11 INI ADA NAMANYA KERJA SAMA DENGAN KERJA SAMA DAERAH SAYA SUDAH MENJELASKAN BENTUK KERJA SAMAA DAERAH DENGAN KERJA SAMAA DAERAH-DAERAH LAIN KERJA SAMA DENGAN

DAERAH DAN PIHAK SWASTA KERJA SAMA SAYA LUPA APA LAGI YANG SATU ITU MAKANYA DALAM KERJA SAMA DAERAH INI ITU YANG AKAN NANTI MEMUAT APA YANG DI SAMPAIKAN OLEH PAK YANG TERHORMAT PAK IMAM DISINI AKAN MEMUAT ITU PERHITUNGAN-PERHITUNGAN YANG RETRIBUSI ADALAH NILAI ACUAN KALAU DIA MELAKSANAKAN AKTIVITAS ITU TENTU NYA NILAI ITU KALAU DIA MENGGUNAKAN SARANA PRASARANA UMUM TADI ITU YANG DI HITUNG TADI NILAI RETRIBUSI KALAU DIA MAU BUKAN MEMBANGUN YA MENYEWAKAN TANAH NEGARA MAKANYA DISITU ADA RETRIBUSI SEWA TANAH NEGARA KALAU KITA MEMBANGUN NANTI BERDASARKAN KERJASAMA MAKA PEMBANGUNAN ITU MENYANGKUT PASAL 11 INI DALAM HAL INI ADALAH KERJA SAMA DAERAH DAN KERJA SMAA DAERAH DIMAN SAYA KATAKAN TADI DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 28 2018 DENGAN PERMENDEGRI 2020 ITU DI ATUR BAGAIMANA KERJA SAMA DAERAH DISITU NANTI PARA PIHAK AKAN BERIKAN KALAU KITA MELAKKUKAN PELAKSAAAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN UTILITAS ITU NANTI YANG DISITU MAKANYA DIA TIDAK MASUK DI DALAM ITU PERIKATAN ITU MENJADI HAL-HAL APAKAH BANGUN SERAT BUNGA BUNGA SERAT BANGUN NANTINYA SETELAH DIA BANGUN DIA SERAHKAN KE SAMA PEMERINTAH KAN DISITU ADA KERJA SAMA ACUANNYA LAGI BERTINDAK KE PERMENDEGRI INI MENGATUR TENTANG SISTEMATIKANYA MAKANYA DI DALAM REGULASI INI KITA MEMBICARAKAN TENTANG INI TAPI BUKAN MENYANGKUT HAL-HAL NANTI BERPINDAH KE KITA MAU KERJA SAMA ANTAR DAERAH KARENA ITU TERSENDIRI JUGA NANTI KALAU KITA MENILAI APA HAK DAN KEWAJIBAN APA YANG HARUS DI LAKSANAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS KALAU NANTI SUMBER PEMBIAYAANNYA ITU TADI DARI PIHAK SWASTANISASI ATAU PIHAK-PIHAK YANG LAIN SAH MAKANYA DI DALAM HAL INI SEMUA SUDAH DI COBA AKOMODIR DNEGAN REGULASI DRAFT INI JADI KITA TIDAK LANGSUNG BAWA SEWA BARANG MILIK DAERAH ITU LANGSUNG DI HITUNG DIA PAKE BERAPA BERAPA METER PERSEGI KARENA PINDAHNYA DI KERJA SAMA DAERAH DULU BUKAN LANGSUNG SEWA BERDASARKAN NILAI YANG ADA DI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KALAU YANG TADI ITU ADALAH SEWA YANG BERKENAN DI HITUNG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN MISLANYA SAYA MAU PAKAI SATU TIANG SATU TIANG ITU KALAU DI BANGUN SENDIRI NILAI SEWANYA SUDAH ADA DI DALAM PERDA KITA DI PERDA NOMOR PERETISI DARI KARENA INI BELUM ADA SEKARANG KAN NANTI DI REVISI PERDA NO 9 2022 ITU SUDAH MENYANGKUT PERUBAHAN ITU SEWA-SEWA PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN ATAU DAERAH MILIK JALAN KARENA SELAMA INI BANYAKNYA TIANG KITA TIDAK BISA MENARIKNYA KARENA BELUM ADA DI DALAM RAMBU KITA ATAU REGULASI KITA DI DALAM PERDA KITA MAKANYA DALAM REVISI NANTI AKAN KITA DORONG DEKAT-DEKAT INI ITU TERMASUK ITUU PEMANFAATAN BAGIAN MILIK JALAN ATAU RUANG JALAN YANG NANTINYA BUKAN APA DIA HARUS SEWA KEPADA PEMERINTAH KARENA DIA MEMANFAATKAN TANAH NEGARA KAN DIA MEMANFAATKAN TANAH NEGARA INI KITA TIDAK MASUK TAPI SEWA ITU HARUS DI HITUNG DENGAN APRESIAL BUKAN PEMERINTAH DENGAN DASAR ITU NANTI DI MASUKAN DI PERUBAHAN PERDA PAJAK RETRIBUSI KITA MAKANYA DUDUKAN-DUDUKAN BERKENAN REGULASI ITU KAMI SUDAH COBA MASUKAN SEMUA DALAM PERDA PENYELENGGARAAN UTILITAS ARTINYA APA YANG DIA MAU PAKAI KERJA SAMA DAERAH KITA MEMBUAT RUANGNYA DIA MAU PAJAK DAN DIA MAU RETRIBUSI ATAU SEWA KITA BUKA RUANGNYA JADI REGULASI INI MEMBUKA RUANG ITU TERGANTUNG DIA MAU PAKAI YANG MANA MAKANYA DI ATUR SEMUA DALAM REGULASI INI MAKANYA TIDAK REGULASI INI MENGATUR

SEMUA TATANAN APA YANG AKAN DI LAKSANAKAN OLEH PIHAK SWASTA KEDEPANNYA YA ITU YANG INGIN SAMPAIKAN MUNGKIN PAK CALI TAMBAHKAN LAGI SO DARI TADI INI

**GHAZALY (BAGIAN HUKUM)**

MOHON IJIN PIMPINAN, MOHON IJIN PAK KABAG. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULAH WABARAKATUH DAN SELAMAT SORE YANG TERHORMAT KETUA PANSUS DPRD KOTA PALU, YANG TERHORMAT ANGGOTA PANSUS DPRD KOTA PALU, YANG TERHORMAT PAK KADIS PU, YANG TERHORMAT PAK KABAG HUKUM, YANG TERHORMAT PAK PROF AMINUDIN KASIM, YANG TERHORMAT KETERKAITAN DARI DI DINAS PTSP DAN KOMINFO KOTA PALU. LANGSUNG SAJA PAK HANYA INGIN MENAMBAHKAN PENJELASAN DARI PAK KABAG HUKUM YAITU TERKAIT DENGAN PASAL 13 JADI PASAL 13 INI MEMANG BENAR ADANYA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN APBD INI HANYA TERKAIT DENGAN PENILAI PUBLIK ATAU TIM PENILAI NAH MEMANG TIM PENILAI ITU YANG ADANYA DI PENEMPATAN PEMBIAYAANNYA ITU SELALUNYA MELEKAT DI BPKD KARENA DISANA ADA BIDANG ASET MEREKA YANG BERTANGGUNG JAWAB JADI EMMANG PEMANFAATN INI BUKAN TERKAIT DENGAN YANG MAU BABANGUN TAPI ORANG YANG MAU MENILAI BERAPA SAJA SEBENARNYA SEWA TEMPAT ITU DAN MEREKA MENGELUARKAN BERDASARKAN KEAHLIAN MEREKA DNA HUBUNGANNYA TADI DENGAN YANG DI SAMPAIKAN DENGAN PAK KABAG HUKUM TERKAIT DENGAN KERJA SAMA POINT-POINT TERSEBUT LAH HASIL PENILAIAN TERSEBUT SEBENARNYA NANTINYA AKAN DI TUANGKAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA JIKA PIHAK KETIGA ATAU INVESTOR YANG AKAN MEMBANGUN JARINGAN-JARINGAN UTILITAS INI KEMUDIAN BERIKUTNYA TERKAIT DENGAN PERENCANAAN JADI MEMANG BENAR ADANYA SEBELUM PEMBANGUNAN HARUS ADA DOKUMEN PERENCANAAN AKAN TETAPI DALAM POSISINYA UNTUK KOTA PALU SENDIRI TIDAK BISA DI LAKSANAKAN PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN KALAU BELUM ADA DASAR HUKUM PERDANYA NAH INILAH KITA MAU BAHAS KALAU SUDAH DI TETAPKAN HASIL PERDA INI BARU HARUS DI TINDAK LANJUTI JADI DOKUMEN PERENCANAAN INI IBARATANYA SEPERTI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEPERTI RPJMD, SEPERTI RPJPD DIMANA SETELAH PERDANYA DI TETAPKAN MUNCUL DOKUMENNYA BERIKUTNYA BAHWA SETIAP DOKUEMEN BERDASARKAN PASAL 5 ITU MENJADI RENCANA INDUK JARINGAN UTILITAS TERAPADU SELAMA 5 TAHUN KEDEPANNYA DIMANA SETIAP INVESTOR ATAU PIHAK SWASTA YANG INGIN MENGGUNAKAN ATAU MENYELANGGARAKAN JARINGAN UTILITAS YANG SUDAH ADA HARUS MENGACU KEPADA RENVAN INDUK JARINGAN YANG DI BUAT INI DISINILAH KAJIANNYA NANTINYA KAJIAN TEKNISNYA KETIKA PERDA SUDAH DITETAPKAN PEMERINTAH KOTA PALU WAJIB HUKUMNYA HARUS MEMBUAT DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 5 INI DAN KEETNTUAN PASAL 5 INI HARUS MELIBATKAN SMEUA UNSUR PIHAK KETIGA ATAU APA SEMUA YANG TERLIBAT DI DALAMNYA DAN ITU HARUS DI PAPARKAN KARENA KENAPA? INI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS JARINGAN UTILITAS DI KOTA PALU SEHINGGA PROGRAM-PROGRAM DARI PIHAK KETIGA ITU SEJALAN DAN SINGKRON DENGAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PALU KEMUDIAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN DI PASAL 5 SMA JUGA BAGAIMANA KITA MAU MENENTUKAN BERAPA JUMLAH YANG DI ATAS TANAH BERAPA JUMLAH YANG MAU DI BUAT DI DALAM TANAH BAGAIMANA ?ITU SEMUA NANTI TERMUAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TERSEBUT DOKUMEN PERENCAANN TERSEBUT

KETENTUAN PASAL 5 MAU MEWAJIBKAN KETIKA PERDA INI DI TETAPKAN HARUS BUAT DOKUMEN PERENCANAAN YANG DI DALAMNYA ADA KEJADIAN TEKNIS MISLANYA SEPERTI YANG TERHORMAT IBU RATNA SAMPAIKAN MISLANYA DI JALAN INI CUMAN SATU ADA DUA JALAN CUMAN DUA TIANG MISALNYA YANG ITU HARUS TERTUANG DALAM DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5 NANTINYA MUNGKIN HANYA TUTP SEKIAN YANG DAPAT KAMI TAMABAHKAN TERIMA KASIH PIMPINA N

**PROF. AMINUDDIN KASIM (TENAGA AHLI)**

ASSLALAMUALAIKUM WARAHAMTULAH WABARAKTUH SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BUAT UNTUK KITA SEMUA YANG SAYA HORMATI KETUA PANSUS KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA PALU, KADIS PU YA? DAN TEMAN-TEMAN YANG DARI KABAH HUKUM JADI GINI SAYA BICARA DARI ASPEK HUKUM APA TADI SSAYA TANGKKAP MOHON MAAF INI ANGGOTA DPR SUDAH TERLALU BAU BICARA TENTANG PERENCANAAN MENURUT SAYA INI DULU DITETAPAKAN SAJA DULU INI PAK SUPAYA ADA DASR HUKUM YANG BERTINDAK MEMBUAT PERENCANAN MAKANYA TIDAK SALAH PAK INI JADI HARUS ADA DASAR HUKUM INI KAN BEGINI HUKUM ITU BERFUNGSI ADA DUA TEORITIS SEDIKIT ADA DUA FUNGSI HUKUM A TOLL A SOCIAL CONTROL ITU ADALAH PASAL-PASAL YANG SEPERTI INI ALAT PENGENDALIAN ADA SATU HUKUM ITU BERFUNGSI A TOOL SOCIAL A ENINERING INI FUNGSINYA INI MENERJEMAHKAN PEMBANGUNAN KE DEPAN KARENA HUKUM ITU SELALU TERTATIH-TATIH MENGEJAR PERKEMBANGAN MASYARAKAT HUKUM DI BUAT PERKEMBANGAN MASYARKAT MAJU DI BUAT LAGI ATURAN CONTOH MISALNYA KEJAHATAN DI BUAT TENTANG UNDANG-UNDANG SEKARANG BARU SATU BULAN MODUS KEJAHATAN SUDAH BERKEMBANG DIBUAT LAGI INI LAH ISTILAH HUKUM SELALU TERTATIH-TATIH INI DIBUAT SEBAGAI A TOOL A SOCIAL ENINERING DI TETAPKAN DULU INI SEHINGGA MENJADI DASAR HUKUM DI BUATNYA DI PERENCANAAN DIBUATNYA MACAM-MACAM BELUM BISA JAUH KE SANA INI PAK MOHON MAAF SAYA LIAT SUDAH TERLALU JAUH KE SANA MANA PERENCANAANNYA INI SAYA BELUM PAHAM MOHON MAAF INI SAYA PERLU KOREKSI BUATKAN DULU INI PASAL LEGALITAS BERTINDAK PEMERINTAH KOTA PALU UNTUK MEMBUAT PERENCANAAN DAN MENYUSUN ANGGARAN NYA SOAL APAKAH NANTI ITU MISALNYA MELIBATKAN MISALNYA PIHAK-PIHAK KETIGA URUSAN KE DEPAN DI LAKUKAN DENGAN KERJA SAMA TAPI ADA DASAR LEGALITAS DULUN YANG MENJADI MAKANYA SEMAKIN LAMA INI DI SEPAKATI DI SETUJUI SEBAGAI PERDA MAKA SEMAKIN LAMA KITA MENEGO-NEGO MISALNYA PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA MENYUSUN PERENCANAAN TATA KOTA MAKANYA TADI SOAL ANGGARAN SAYA JUGA ITU SAYA MENGACU LAGI PADA DARI ASPEK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMDA MEMBAGI URUSAN ABSOLUT DAN KONKUREN URUSAN ABSOLUT BUKAN URUSAN NYA KITA ITU AGAMA PERADILAN LUAR NEGERI URUSAN KONKUREN ITU ADALAH DI BAGI ADA URUSANNYA PUSAT PENGORONVESI DAN KABUPATEN KOTA NAH YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR YA URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN DASAR TERMASUK KAEBUPATEN KOTA LAKSANAKAN ADALAH SELAIN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN JUGA TENTANG PEMUKIMAN DAN TATA RUANG KALAU BICARA SOAL JARINGAN PASTI BERURUSAN DENGAN TATA RUANG IYA JADI TIDAK ADA ALASAN MENURUT SAYA PASAL TADI TERGANGGU MEMANG HARUS DI ANGGARKAN DI APBD DONG KARENA URUSAN WAJIB BEDA DENGAN URUSAN PILIHAN MISALNYA URUSAN PILIHAN ITU ADALAH PERPUSTAKAAN IYA EH BUKAN URUSAN, URUSAN PILIHAN ITU ADALAH PERIKANAN KALAU DIA ADA LAUT

DAERAH ITU IYA ITULAH JADI INI URUSAN WAJIB MAU TIDAK MAU TIDAK BISA TIDAK BISA TERSENTUH DENGAN APBN KARENA BERKAITAN BERURUSAN TADI PENATAAN PEMUKIMAN DAN TATA RUANG SOAL MAKANYA MUNGKIN SUPAYA TIDAK TERGANGGU TEMAN-TEMAN CONTOHKAN SAJA CUMA DENGAN KEMAMPUAN ANGGARAN APBD INI KAN SAYA BILANG TADI INI HUKUM AKAN DI PAKE KE DEPAN MISALNYA SATU TAHUN, SATU TAHUN SETELAH DI TETAPKAN TIBA-TIBA MEMBENGGAK PABD NYA KOTA PALU KARENA INI ADALAH KOTA JASA YA MEMBENGGAK MAKA TADI TIDAK ADA DASAR HUKUM YANG MAU DI TANYA ITU EH DISINI LAH DIA BISA MENJAWAB NYA JADI HUKUM ITU BERFUNGSI PASAL-PASAL ITU ADALAH SEBAGAI LANGKAH LEGALITAS UNTUK MENGATASI DI KEMUDIAN HARI KALAU ADA KEKOSONGAN HUKUM OHH INI SUDAH DASAR HUKUM NYA NOH BAGAIMANA KALAU TIDAK ADA KARENA ITU TIDAK ITU TADI HUKUM SELALU TERTATIH-TATIH MENGEJAR MAKANYA DI BUAT ATURAN INI UNTUK MENTERJEMAHKAN PEMBANGUNAN KE DEPAN YAITULAH NAMANYA DALAM KITA DI KAMPUS A TOOL OF SOCIAL ENGINERING JADI MENURUT SAYA MOHON IZIN BAPAK-BAPAK ANGGOTA KALAU BISA JANGAN TERKESAN PROSES PEMBANGUNAN YANG BERJALAN INNHEREN TENTANG SOAL JARINGAN TATA RUANG NANTI TERBACA YANG MENGHAMBAT INI PEMBANGUNAN KE DEPAN JUSTRU DARI WAKIL RAKYAT DI SINI KARENA ITU LAMA SEKALI DI TETAPKAN DASAR HUKUMNYA UNTUK MENJADI DASAR BERTINDAK BAGI WALI KOTA MENYUSUN PERENCANAAN DENGAN DINAS-DINAS MENYUSUN ANGGARAN NAH ITU KIRA-KIRA MUNGKIN ITU SEDIKIT KURANG ENAK BAGI ANGGOTA DPR TAPI SAYA HARUS COBA KEMUKAKAN DARI SEGI KEILMUAN MOHON MAAF INI PAK KETUA TEMAN-TEMAN KALAU ADA YANG ITU SAYA MOHON MAAF ASSALAMUALAIKUM WARAHAMATULLAHI WABARAKATUH

**ABDURRAHIM NASAR AL'AMRI (ANGGOTA PANSUS)**

CEK SAYA , SAYA LANGSUNG YA BOLEH YA IZIN PAK PROF SAYA SAMBIL SHARING SEBENARNYA IZIN PAK PROF GINI YA SAYA MENERIMA YANG TANGGAPANNYA PAK PROF SEMUA TADI ITU BETUL PAK ADANYA CUMA GINI PAK KAMI INI SEBENARNYA KALAU MEMANG DASAR HUKUMNYA HARUS KITA UTAMAKAN DULUAN KAMI PUN SETUJU PAK CUMA ADA YANG HARUS KAMI SAMPAIKAN KEPADA KITA SEMUA DI SINI KITA INI BARU-BARU INI 2024 PAK DEFISIT BESAR-BESARAN MENGENAI ANGGARAN KARENA ADA SESUATU PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG HARI INI KITA MENGEJAR DENGAN APBD TIBA-TIBA TIDAK MENCAPI JADI BANYAK HARUS SEBENARNYA PERLU KITA LAKUKAN DULU MENURUT SAYA INI PAK DENGAN ADANYA INI UTILITAS MENURUT KAMI BELUM SANGAT LAYAK HARUSNYA TAPI DENGAN ADANYA PENGEMBANGAN PAK WALI UNTUK MEMBANGUN KOTA PALU YANG LEBIH CANTIK YA KITA HARUS MENDUKUNG TAPI YANG SAYA MENGGAMBARAKAN DI SINI KENAPA KAMI BILANG RITME APBD YANG KAMI MINTA INI PAK DI PASAL 13 INI SUPAYA KAMI HILANGKAN KARENA KAMI MENDAPATKAN PAK BEBERAPA PROVINSI MUNGKIN HAMPIR SEMUA PROVINSI YANG MELAKUKAN INI TIDAK MENGGUNAKAN APBD ITU PERTAMA TAPI KALAU MEMANG DASAR HUKUMNYA HARUS KITA UTAMAKAN DULUAN UNTUK MENGEJAR ITU OKEOKE AJA KARENA SAYA CONTOH TADI PAK SEBELUMNYA SAYA BICARA MASALAH BIS DI BANGGAR ITU KAMI BERDEBAT PAK JANGANKAN BIS LAGI MAU MOBIL SAMPAH PUN KAMI BERDEBAT MUNGKIN SEBAGIAN ANGGOTA DPR MENOLAK DENGAN ADANYA ITU SEMUA TAPI DENGAN KAJIAN YANG TIDAK PERNAH KAMI DIBERIKAN TIDAK PERNAH DI GAMBARAKAN KEPADA KAMI TIBA-TIBA SUDAH MUNCUL TIBA-TIBA ANGGOTA DPR SUDAH DI UNDANG

UNTUK MENGHADIRI ITU INI YANG KAMI HINDARI KARENA APA JANGAN NANTI KAMI INI SAYA CONTOH SAYA MAU PROTES PAK MISALNYA DI TIKTOK YANG DI HANTAM ITU SIAPA ANGGOTA DEWAN LUCU YA ANGGOTA DEWAN HANTAM BIS PADAHAL YANG SAH KAN KALIAN, KAN ITU ANEHNYA PAK YANG KENANYA KEPADA KAMI YAITU ANGGOTA DPR NYA DI SATU SISI KAMI WAKTU PEMBACAAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN ATAU DINAS TERKAIT MENYIAPKAN FASILITAS NYA HALTENYA DIA PUNYA TIBA-TIBA DENGAN PERJALANAN DI BANGGAR KAMI DI MUNCULKAN DENGAN ANGGARAN INI KAN SATU JEBAKAN JUGA KEPADA ANGGOTA DEWAN EH INI YANG KITA MINTA TADI SAYA BERKERAS TADI KEPADA KABAG HUKUM APAKAH KALAU MEMANG ANU KITA SUDAH SEPENDAPAT SEBENARNYA TEMAN-TEMAN DPR ITU ULANG-ULANG KAMI BILANG KAMI SANGAT MENDUKUNG APA YANG DI PROGRAMKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PALU HARI INI KAMI SIAP KARENA SEMUANYA BAGUS TAPI KAMI JUGA BUTUH IDE-IDE GAGASAN YANG SAMA-SAMA KITA PIKIRKAN BERSAMA BUKAN ITBA-TIBA SEPIHAK KAMI YANG TERSOROT PADAHAL KAMI TIDAK PERNAH MENGHALANGI SAYA BILANG TADI DARI AWAL IBU DARI PERIZINAN IKUT DARI BAGIAN HUKUM JUGA IKUT KE DKI DKI ITU MEMAKAI JAKPRO TANGERANG SELATAN ADA DIA PUNYA APA NAMANYA ASOSIASI MEREKA YANG MENGGUNAKAN INI ANGGARAN JADI KALAU KAMI INI SEBENARNYA SOLUSINYA MEMANG BETUL KALAU MUNGKIN PAK PORF TADI MENJELASKAN DAN DARI PIHAK HUKUM TADI BILANG KITA HARUS SAHKAN DULU ININYA OKE TAPI KAMI BAGI ANGGOTA DPR MUNGKIN DARI SAYA FRAKSI DEMOKRAT KALAU INI SUDAH DI SAHKAN TAPI MENGGUNAKAN APBD KMAI MENOLAK KENAPA INI KAMI BETUL-BETUL ANGGARAN HARI INI AJA KITA DEFISIT BESAR SAMPAI DETIK INI BANYAK KONTRAKTOR BELUM TERBAYAR PAK INI KALAU DI TUNGGU MAU DI ISOMASI MAU BAGAIMANA KITA TAPI ALHAMDULILLAH DENGAN ADANYA ANGGARAN MUNGKIN EFISIENSI KEK ATAU ANGGARAN APAPUN ITU KITA HARUS UTAMAKAN INI DULU YA ITU TADI SAYA BILANG HARI INI YANG LUCUNYA YANG SAYA MAKSUDKAN KENAPA KOTA PALU INI PEMERINTAH TIDAK BISA BERTINDAK DENGAN XL DENGAN INDIHOME KENAPA KITA TIDAK BISA TARIK MEREKA INI DULU YANG HARUS KITA PIKIRKAN KALAU SAYA SEBAGAI IBARATNYA MELIHAT DI SINI PAK XL ITU SEENAK JIDATNYA MEMBANGUN INDIHOME SEENAKJIDATNYA MEMBANGUN YANG BAYAR SIAPA MASYARAKAT KEPADA MEREKA ADA PEMERINTAH MASUK ANGGARANNYA TIDAK ADA INI DULU YANG KITA PIKIRKAN MENURUT SAYA TAPI KALAU MEMANG KITA MAU PIKIRKAN BAGUSNYA KOTA PALU BETUL TAPI SAYA DENGAR KEMARIN BEREDARNYA BAHWA PAK WALI ITU AKAN MEMIKIRKAN MUNGKIN TIANG TERPADU YANG SATU TIANG UNTUK KESELURUHAN LEBIH MUNGKIN LEBIH RAMPING DIA DAN LEBIH CANTIK TAPI KALAU MEMANG KE DEPAN INI SUDAH DI SAHKAN DASAR HUKUMNYA YA KIA HARUS BETUL-BETUL MEMINTA KAJIANNYA JANGAN TIBA-TIBA MASA TIBA AKAL SUDAH TIBA-TIBA DI KERJAKAN INI BARANG TIBA-TIBA KONTRAKTOR SUDAH ADA INI YANG HARUS KITA PIKIRKAN BERSAMA JADI JANGAN NANTI KITA TERJEBAK KARENA YANG SIKSA DI DEPAN MASYARAKAT DAN YANG DISERANG OLEH MASYARAKAT ITU DPR LUCU KALIAN YANG SAHKAN TAPI KALIAN YANG PROTES GITU PAK MUNGKIN PAK PROF JADI MUNGKIN ITU GAMBARAN DARI SAYA PAK KALAU KAMI SEPENDAPAT APAPUN PROGRAM PAK WALI KAMI SELAKU PARTNER DI EKSEKUTIF ATAU DENGAN LEGISLATIF PASTI MENDUKUNG CUMA YANG KAMI BUTUH KAN JANGAN TIBA MASA TIBA AKAL KAMI TIBA-TIBA DAPAT SUDAH JADI BARANG INI PEMBAHASANNYA TIDAK DI LIBATKAN NAH KALAU INI KAN ENAK KITA MENGIKUTI ATURAN NYA DENGAN PANSUS INI KITA BERPARTISIPASI KARENA APA KITA

SUDAH PERNAH TURUN KE DUA PROVINSI DAN PROVINSI BUKAN PROVINSI KECIL YANG KITA DATANGI PROVINSI DKI DAN TANGERANG SELATAN DUA-DUANYA TIDAK MENGGUNAKAN APBD ITU SAJA SEBENARNYA DARI SAYA MUNGKIN DARI PAK PROV IZIN DARI SEMUA KABAG HUKUM SAYA TIDAK MAU MENOLAK KAMI MENERIMA KALAU MEMANG HARUS DI SAHKAN DULU DASAR HUKUMNYA KITA TERIMA OKE TAPI MOHON MAAF APAKAH KE DEPAN LEBIH BAIK KITA PIKIR KAN KALAU MENGGUNAKAN APBD TIDAK ANGGARAN KECIL INI MENURUT SAYA PAK INI MASIH ANGGARAN BESAR NAH MUNGKIN ITU SAJA DARI SAYA TERIMA KASIH PIMPINAN INI SAYA KEMBALIKAN KEPADA PIMPINAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

IYA LUAR BIASA TUNGGU KITA DENGARKAN DULU DARI IBU MAYASARI

**RATNA MAYASARI AGAN, SE (WAKIL KETUA PANSUS)**

IYA BAIK PIMPINAN MUNGKIN SAYA LANGSUNG SAJA MENANGGAPI APA YANG DI SAMPAIKAN OLEH PAK PROF KAMI MEMAHAMI KETIKA BERDISKUSI BAHWA BEBERAPA OPD MENYAMPAIKAN KETIKA PERDANYA DI SAHKAN KEMUDIAN AKAN ADA RENCANA INDUK YANG DI TUANGKAN DALAM MASTER PLAN NAH BEGINI MAKSUD KAMI ADALAH KAMI SUDAH BEBERAPA KALI YANG NAMANYA MEMBAHAS PERATURAN DAERAH DAN KAMI TIDAK MAU BUKAN BERARTI KITA MENGHAMBAT TIDAK PAK PROF TAPI KAMI TIDAK MAU MEMBAHAS ATAU MENETAPKAN HAL -HAL YANG BELUM TERINCI KAMI KETAHUI KARENA KENAPA YANG PERTAMA KALAU MEMANG BELUM ADA RENCANA INDUKNYA TAPI PALING TIDAK SUDHA ADA GAMBARANNYA YANG INILAH YANG KAMI SELALU DISKUSIKAN DENGAN OPD BEBERAPA KALI PADA SAAT PERDA UTILITAS INI KAMI BAHAS KARENA KAMI INGIN MENGETAHUI SEJAUH MANA URGENSITASNYA DARI PROGRAM INI APAKAH SUDAH MASUK DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS DI DAERAH KOTA PALU KARENA KALAU MENGGUNAKAN APBD OTOMATIS INI KAN AKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN YANG BESAR NAH SETELAH KITA BERDISKUSI KITA STUDI BANDING DENGAN DUA DAERAH TERNYATA KEDUA DAERAH ITU SAMA SEKALI TIDAK MENGGUNAKAN PABD NAH INILAH YANG KAMI COBA ADOPTI TENTUNYA DENGAN GAMBARAN-GAMBARAN DARI RENCANA INDUK KAN PASTI KAYA PAK KADIS PU KAN SUDAH TAHU KAN MESKIPUN BELUM TERTUANG DALAM DOKUMEN TAPI KAN SUDAH ADA GAMBARAN-GAMBARANNYA ITU MAKSUD SAYA DPR INI BUKAN CUMA CAP STEMPEL BUKAN TAPI KAMI PERLU MENELAHAH APA ISI DARI RANPERDA INI APAKAH SUDAH MASUK DALAM PROGRAM PRIORITAS PERMBANGUNAN CONTOHNYA BEBERAPA HAL YANG SUDAH DI SAMPAIKAN OLEH YANG TERHORMAT PAK WIM KEMARIN BEBERAPA TAHUN KEMARIN HARI INI KITA PENGADAAN BISNYA KITA ITU 26 UNIT DENGAN PEMBEBANAN BIAYA APBD TIAP BULAN 1,8 MILYAR NAH KIRA-KIRA BAGAIMANA KETIKA KITA JUGA SEMUA PROGRAM TIBA-TIBA HARUS KITA LANGSUNG SAHKAN TIDAK TENTUNYA PERLU KAJIAN APAPUN ITU PERLU KAJIAN MAKANYA KAMI BUKAN MENGHAMBAT TAPI KAMI PERLU NAMANYA PENGKAJIAN BERSAMA NAH UNTUK ITU SAYA JUGA MENYAMPAIKAN KALAU MEMANG DI BUTUHKAN APRESIAL DI BUTUHKAN APRESIAL PASTINYA MEMANG MEMERLUKAN DANA NAH INI YANG KITA DISKUSIKAN SUMBER DANANYA DARI MANA BERAPA BUDGETNYA NAH RUANG UNTUK PEMBUATAN TEMPAT UNTUK JARINGAN UTILITAS INI KAN KETIKA KITA COBA DISKUSI DENGAN DKI LUAR BIASA NILAINYA ANGKANYA LUAR BIASA KALAU KITA MENGGUNAKAN APBD APAKAH PROGRAM-PROGRAM LAIN BISA

TERLAKSANA KALAU KITA FOKUSNYA CUMA DI SINI SAYA ANGGAP BELUM PRIORITAS KENAPA KARENA ITU TADI BAHWA MASIH BANYAK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG LEBIH MUNGKIN BISA KITA DORONG UNTUK MENJADI PRIORITAS TERUTAMA PEMBANGUNAN MANUSIA MASYARAKAT KITA ITU YANG PERLU KITA DORONG KALAU TIDAK SALAH KITA SUDAH DAPAT BANTUAN DI JALAN PROFESOR MUHAMMAD YAMIN YA PAK YA KENAPA TIDAK ITU DULU TIDAK ITU DULU KITA COBA SEBELUM KE TEMPAT YANG LAIN ITU MAKSUD SAYA TETAPI KALAU MEMANG INI SEPERTI DI PASAL 13 INI MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN KHUSUS UNTUK APRESIALNYA SAJA COBA KITA DISKUSI KAN BERSAMA KALAU MEMANG SEPERTI ITU HARUS WAJIB MENGGUNAKAN APRESIAL TAPI UNTUK PASAL 43 SAYA JUGA DARI FRAKSI AMANAT SOLIDARITAS AKAN MENOLAK KETIKA PROGRAM INI HARUS MENGGUNAKAN APBD UNTUK PEMBANGUNAN NYA PENYIAPAN BOXNYA DAN LAIN SEBAGAINYA ITU KITA COBA CONTOHLAH DENGAN DAERAH-DAERAH LAIN YANG KITA MAU BERSAMA ADALAH KETIKA ADA PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN ITU BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT ITU DULU ITU YANG KITA INGINKAN DI DPR INI TERIMA KASIH PIMPINAN

#### **H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

BAIK TERIMA KASIH IBU MAYA SARI AGAN SAYA INGAT MAYA SARI SOALNYA BAIK PAK PROF DARI SAYA JUGA INI MEMANG KALAU APA YANG PAK PROF JELASKAN TADI ITU SAYA JUJUR SECARA PRIBADI SAYA ITU JUGA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PAK PROF KENAPA TIDAK SEPENDAPAT PAK KARENA URUSAN-URUSAN HUKUM INI PASTI AKAN BERKAITAN DNEGAN URUSAN-URUSAN TEKNIK NAH SEBAB AKIBAT DARI URUSAN HUKUM INI AKIBAT DARI TERJADINYA TEKNIK NYA KALAU TIDAK TERJADI ADA KEJADIAN DI TEKNIK BAGAIMANA MAU ADA URUSAN HUKUM COBA KITA MUNGKIN SAYA SALAH YA TAPI DALAM PEMAHAMAN SAYA SEPERTI ITU PAK MAKANYA KITA BUTUH REGULASI INI BETUL-BETUL KITA OLAH KITA GODOK BUKAN HANYA UNTUK MEMPERLAMAKAN WAKTU DAN LAIN SEBAGAINYA TAPI INI KITA HARUS SAMA-SAMA MEMAHAMI INI AKIBAT TRAUMA DARI KEJADIAN-KEJADIAN SEBELUMNYA SEBENARNYA INI KEJADIAN-KEJADIAN YANG KALAU SAYA KAN BARU DI SINI IBU RUSTIA BARU TAPI KALAU DORONG IBU RATNA PAK ANDRIS PAK WIM PAK IMAM INI KAN ORANG-ORANG LAMA DISINI MUNGKIN MEREKA TRAUMA KETIKA SUDAH DI OKE-OKE TERNYATA OKE GAS PADAHAL GAS SAJA YANG KELUAR TIDAK ADA DIA PUNYA APA-APA BEGITU MUNGKIN SEPERTI ITU PAK JADI MEMANG BETUL-BETUL KITA HARUS MELAKUKAN PENELITIAN JADI ARTINYA WALAUPUN NASKAH EH PERENCANAAN TEKNISNYA BELUM ADA PALING TIDAK DALAM RANPERDA YANG AKAN KITA SETUJUI INI YANG KITA BAHAS INI SUDAH BETUL-BETUL PAHAM JADI KITA TIDAK HANYA JADI SEPERTI YANG DI KATAKAN DARI IBU RATNA KITA JADI TIDAK TUKANG STEMPEL DISINI SAYA JUGA PAK PROF SAYA JUJUR SAYA DUDUK DI DPR INI SAYA JUGA TIDAK MAU MENJADI TUKANG STEMPEL SAYA DARI DULU SAYA SUDAH KATAKAN DENGAN TEMAN-TEMAN SAYA TIDAK MAU JADI TUKANG STEMPEL PAK KALAU CUMA JADI TUKANG STEMPEL NGAPAIN SAYA DUDUK DARI PAGI DI SINI PAK DARI PAGI KITA SAMA-SAMA MEMBAHAS INI BEGITU SAYA TIDAK MAU JADI MUNGKIN ITU DARI SAYA JIKA ADA YANG MAU DI TAMBAHKAN KARENA INI WAKTU SUDAH JAM SETENGAH 5 MUNGKIN KALAU MEMANG MASIH ADA SILAHKAN TAPI KALAU TIDAK RAPAT PANSUS INI KITA SKORSING LAGI MUNGKIN DI BESOK HARI PAK MASIH ADA YANG MAU DITAMBAHKAN PAK KABAG. SILAHKAN PAK PROF

**PROF. AMINUDDIN KASIM (TENAGA AHLI)**

PADA CARA Pandang Hukum tadi ini kan Perda di buat bisa 50 tahun berlaku sepanjang masih bisa sesuai dengan tuntutan kebutuhan kota pada waktu itu tidak harus bayangan kita di suatu tau di ganti di ubah misalnya 20 tahun ada undang-undang bayangkan undang-undang badan urusan milik daerah itu yang dulu saya saksi ahli di Luwuk sudah 40 tahun masih berlaku ada undang-undang masih 20 tahun itu lah jadi tujuannya untuk menterjemahkan membaca kembangannya ada itu yang di pakai dasar hukum jadi bayangan saya kalau biasanya 20 tahun ini Perda berlaku 20 tahun kemudian APBD apa lagi bersentuhan dengan pemukiman dan tata ruang tadi maka tidak ini urusan wajib urusan wahid wajib berkaitan dengan PLN nandasa pasti sewa saya misalnya di cantumkan pasal itu emanya sudah harus pasti harus di laksanakan di sebelah itu ada diskresi mana kala keuangan kemampuan daerah seperti contoh bus tadi membebani APBD kalau saya walikota saya gunakan perangkat hukum hentikan semua operator itu karena membebani APBD tidak salah dari segi hukum ada diskresi jadi ini begini pak saya ini berikan keterangan ahli termasuk pak Rudi keterangan ahli itu lah yang menentukan dia bebas sampai di hentikan kasus banyak sekali saya supaya meluruskan bapak mohon maaf anggota Dewan meminta perencanaan bagaimana perencanaan ada dasar hukumnya ini saja belum ada menurut saya begini pak mohon maaf gimana ya bagaimana caranya harus ada legalitas bertindak, iya baru bisa bikin perencanaan nanti setelah itu tidak hilang fungsi pengawasan DPRD ketika kenapa perencanaan ini masuk lagi kan tugas DPR pengawasan mengawasi peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lain termasuk peraturan walikota bupati tidak berhenti pengawasan itu jalan karena tidak fungsi DPRD legislasi lalu soal anggaran tadi ini kan tidak berdiri sendiri ketika misalnya soal anggaran tadi masih ada Perda APBD kalau di pandang anggota DPR kemampuan keuangan pad tidak naik maka Perda APBD yang melalui, apa, iya jangan disetujui dulu meskipun ada pasal ini tapi pasal ini menjawab di tancapkan belum tentu di cuman mengantisipasi itu fungsinya hukum meantisipasi hal kedepan itulah hukum di haidrkan nah ini kan hukum pak jadi tidak harus sudah di tancapkan APBD soal bisa nanti jadi dari pihak ketiga bagus kalau dia masuk meskipun ada disitu tidak masalah tidak terkore APBD cuman hukum itu fungsinya menandakan sesuatu untuk bisa menangani persoalan di kemudian hari itu yang tadi itu saya amu dudukan, kalau itu bisa saja pak tererah cuman misalnya itu kami ingatkan ini kan apapun saya kemukakan pak saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bapak cuman saya cara berpikir hukum andai kata ini bapak hilangkan kemudian kemudian hari sepuluh tahun Perda ini tidak di rubah dan sudah membengkak karena ini kemana APBD itu semua misalnya dalam hal menata ruang publik urusan pemerintah kita pura nandasa ya jadi tidak ada masalah pak di hilangkan cuman saya mengingatkan dari segi ilmu hukum saya jadi silahkan tapi tidak terlibat dalam formulasi bapak mau hilangkan terserah nah misalnya suatu saat membengkak bapak rubah saja kan ini juga tidak seperti

AL-QURAN TIDAK BISA DI UBAH SATU TAHUN PUN BISA DI UBAH CUMAN KALAU SELALU KITA MENGUBAH BERARTI KEMATANGAN INI KAN BEGITU INI PAK BIRO HUKUM KALAU SAYA MEMBUAT NASKAH AKADEMIK YANG SEBENARNYA YANG DI KOREKSI DI PERSIDANGAN INI NASKAH AKDEMIKNYA KALAU SAYA MEMBUAT NASKAH AKDEMIKNYA PAK ITU BIASANYA KESIMPULAN INI KAN DARI HASIL RISET KAN BEGITU LANDASAN TEORINYA,SINKRONISASINYA KESIMPULAN BIASANYA NASKAH AKADEMIK PERTAMA BAHWA PERLU DI BUATKAN PERDA KESIMPULAN KEDUA BISA KEMUNGKINAN TIDAK PERLU DI BUATKAN PERDA TAPI CUKUP DENGAN PERATURAN BUPATI SAYA PERNAH PRAKTEKAN DI PASANGKAYU DIA INGIN MEMBUAT SEPADAN PANTAI SEMENTARA PERSADAN PANTAI ITU SUDAH DI DEKATKAN DI TATA RUANG INI UANG 300 JUTA BIKIN NASKAH AKADEMIK RAPAT SAYA BILANG TIDAK BISA SAYA HARUS,JADI KESIMPULAN NASKAH AKADEMIK BAHWA TENTANG INI HAL TIDAK PERLU DI BUATKAN PERDA CUKUP PERATURAN BUPATI IYA MAKANYA JADI DISITU BISA KESIMPULAN JADI KARENA INI SUDAH KAJIAN AKADEMIK INI HARUS DI,KIRA-KIRA BEGITU MOHON MAAF SEKALI LAGI BAPAK-BAPAK,IBU-IBU SEKALIAN SAYA INGIN SAJA MENDUDUKAN PERSPEKTIF HUKUM CARA MEMANDANG HUKUM KINI DAN KEDEPAN IYA KIRA-KIRA BEGITU MAKASIH.

#### **H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

YA BAIK BAGAIMANA TEMAN-TEMAN KITA SKORS SAMPAI BESOK ? UNTUK INI KARENA INI MEMANG PAK KABAG KITA MAUNYA INI MEMANG KITA BACA KITA BAHAS BUKAN BERARTI KITA BACA KITA BAHAS KITA SAHKAN BUKAN BEGITU ATAU KITA BACA LANGSUNG SAHKAN TIDAK MEMANG KITA BAHAS INI UNTUK KITA BACA KITA BAHAS DULU KITA DISKUSI SEMUANYA SUPAYA KITA SAMA-SAMA SALING PAHAM BEGITU INI KARENA TRAUMA YANG LALU INI BEGITU MUNGKIN SEPERTI ITU JADI ADA YANG MAU DI SAMPAIKAN PAK KABAG

#### **MOH. AFFAN (KABAG HUKUM)**

YA SAYA SEDIKIT SAJA PAK KARENA INI KITA PUNYA INI SANGAT MENINDIS YANG PERTAMA PAK TERIMA KASIH ATAS SARAN MASUKAN TADI PAK PROF SUDAH MENJELASKAN PANJANG LEBAR TENTANG KONSURUSI HUKUM DAN PENJELASAN HUKUM ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT JUGA MEMANG APA YANG DI PASAL 13 TENTANG PEMBIAYAAN INI SEBENARNYA MENGGAMBARAKAN ALUR YANG AKAN DI LAKUKAN BILA MANA KALAU KITA MAU MENETEPAKAN DI AYAT 4 RETRUBUSI YANG TAREK SEWA ITU MAKANYA DI BUATLAH SATU HAL NORMA YANG MUNGKIN YA APAKAH MAU DI HILANGKAN INI KAN TERGANTUNG KITA APAKAH INI KAN HANYA MENYANGKUT PEMBEBANAN PEMBIAYAAN SAJA MAKANYA DI AYAT (2) INI KALAU KITA MAU MEMASUKAN TADI ITU MUNGKIN KITA MASUKAN NORMA YANG DI AYAT (2) INI TAPI KALAU NANTINYA INI KAN SUPAYA TIDAK ADA YANG DI BEBANI OLEH APBD KITA KAN ITU TUJUANNYA KAN NAH TAPI SEBENARNYA KITA PAHAMI BERSAMA KALAU KITA MENGGUNAKAN JASA YA BISA HARUS BAYAR APAKAH NANTI BAYAR NYA BAGAIMANA MUNGKIN SUPAYA TIDAK TERGAMBARAKAN DALAM PASAL INI MUNGKIN ITU MENJADI CATATAN KAMI JUGA DAN ITU KAN MUNGKIN KITA AKAN BICARAKAN NANTI DI SETELAH DI SKORS MUNGKIN BESOK KITA PINDAHKAN APAKAH APAA YA AYAT (2) INI YANG BERKENAN DENGAN PEMBEBANAN DI BELANJA INI APAKAH DI BUNYIKAN DISINI ATAU NANTI INI ADALAH TEKNIS PELAKSANAAN NYA KARENA INI SUDAH TEKNIS PELAKSANAAN INI YA JADI TIDAK PERLU MUNGKIN DI BUNYIKAN TETAPI DALAM PELKASANAAN INI NANTI TETAP ADA PEMBIAYAAN BEGITU IYA NANTI KITA HAPUS

SAJA YA EKSEKUSI SAJA HAPUS SAJA NANTI DALAM PELAKSANAAN KITA MASUKAN DALAM IYA KARENA INI NANTI KAN ADA DI BPKD KAN MASALAH PERHITUNGAN-PERHITUNGAN INI SUPAYA FASE FRASA DARI NORMA INI MUNGKIN ITU YANG AKAN KITA SARAN SAYA SUPAYA KITA TIDKA LAMA-LAMA DISINI PAK TIDAK BER PUTAR-PUTAR GARA-GARA INI SAJA MUNGKIN ITU SAJA PAK PROF IJIN PAK PROF IYA MUNGKIN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ITU SARAN DARI KAMI IYA SAYA SUDAH MAU MATIKAN JUGA INI

**H. ALFIAN CHANIAGO, SE (KETUA PANSUS/PIMPINAN RAPAT)**

KOMINFO,DARI KOMINFO TIDAK AAD YANG MAU DISAMPAIKAN IBU SOALNYA PAK RIDWAN TADI SUDAH PERGI DIA YA BAIK KITA SKORS SAMPAI BAIK PAK KABAG KITA SKORS SAMPAI BESOK JAM 10 YA KARENA ADAA RAPAT LKPJ JAM 2 OKE WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULAH WBAARAKATUH.

**\*\*KETUK PALU 3X\*\***